



DUKUNGAN: Kampanye Helmi Hasan di Bengkulu Selatan disambut antusias warga.

Kado 52 Tahun Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan Cetuskan Bangun Bandar Udara

BENGKULU - Helmi Hasan berjanji akan mengaktifkan pangkalan udara di Bengkulu Selatan. Pangkalan udara di Jalan Raya Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan yang sempat menjadi pertahanan terkuat dan terbesar di zaman penjajahan Jepang di Sumatera Bagian Selatan itu akan diaktifkan kembali. Hal ini

disampaikan Helmi Hasan saat bertemu ratusan relawan Helmi-Muslihan, Kamis (19/11) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pangkalan itu sendiri saat ini kondisinya tak terurus. "APBD untuk Rakyat, kita gunakan APBD untuk kemaslahatan rakyat."

► Baca **KADO...Hal 7**



MENGUAT: Masyarakat semakin bulat memenangkan Rohidin-Rosjonsyah dalam Pilgub 9 Desember mendatang.

Masyarakat Dukung Rohidin-Rosjonsyah Wujudkan Mukomuko Sebagai Lumbung Pangan

MUKOMUKO - Masyarakat Mukomuko mendukung kepemimpinan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu, berlanjut pada periode berikutnya. Hal ini lantaran program pemberdayaan petani dan optimalisasi kawasan pertanian hingga strategi pasar yang digagas Rohidin, dinilai masuk akal.

Muslim, warga Desa Tirta Mulya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko mengungkapkan harapan para petani di wilayahnya kepada Rohidin Mersyah saat kampanye dialogis, Kamis (19 November 2020).

► Baca **MASYARAKAT...Hal 7**

Cab. Bandung

Aromania
perfumery
Refill Parfume

TERAS

Wapres Tengok Uji Coba Simulasi Vaksin



MA'RUF AMIN

JAKARTA - Persiapan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan pemerintah. Penelitian hingga skenario pemberian terus diujicobakan. Termasuk mengantisipasi isu yang menghalangi pemberian vaksin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dia menegaskan proses simulasi itu penting untuk mendukung kelancaran keseluruhan program vaksinasi Covid-19 yang dirangsang pemerintah. "Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan supaya nanti vaksinasinya berjalan dengan baik. Termasuk menyiapkan data-data," katanya.

► Baca **WAPRES...Hal 7**



DUKUNGAN: Cagub Agusrin M Najamudin saat bersama keluarga besar mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, kemarin.

Keluarga Besar Ridwan Mukti DUKUNG AGUSRIN

BENGKULU - Keluarga besar Ridwan Mukti (RM), mantan Gubernur Bengkulu mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 Agusrin M Najamudin Imron Rosyadi untuk memimpin Provinsi Bengkulu ke depan, Kamis (19/11/20). Ibu Neli Tama, Bibi Ridwan Mukti mengungkapkan, "Jadi keluarga besar Ridwan Mukti

full dukung Pak Agusrin Imron, berikut seluruh tim Ridwan Mukti di Rejang Lebong dahulu," ungkap neli tama yang tak lain bibi Ridwan Mukti, Kamis (19/11) di sela kunjungan silaturahmi Agusrin di Desa Talang Ulu Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

► Baca **KELUARGA...Hal 7**

Tewas, Laka Saksi Agusrin Didalami

Rencana Jumanto Mau ke Bengkulu

BENGKULU - Sahabat Agusrin M Najamudin, Jumanto tewas dalam kecelakaan lalu lintas (lantas) di kawasan Kemang Timur, Jakarta Selatan pukul 03.00 WIB, Kamis (19/11). Ia merupakan saksi fakta Cagub dan Cawagub Bengkulu, Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi dalam sidang gugatan melawan KPU Provinsi Bengkulu di Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Ia juga merupakan saksi fakta Agusrin-Imron dalam sidang pengadilan di DKPP RI versus lima komisioner KPU Provinsi Bengkulu yang masih berproses saat ini.

► Baca **TEWAS...Hal 7**



JUMANTO

Kemenag Minta Lebih Ketat Menerapkan Protokol Kesehatan

Visa Umrah Kembali Terbit

JAKARTA - Setelah sempat ditutup sementara, akhirnya visa umrah untuk jamaah asal Indonesia kembali terbit kemarin (19/11). Kementerian Agama (Kemenag) berpesan kepada

travel umrah supaya lebih ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Supaya tidak ada jamaah umrah positif Covid-19 yang lolos sampai ke Makkah.

"Alhamdulillah. Kita tentu senang bahwa visa umrah telah dapat dike-

luarkan lagi untuk jamaah Indonesia," kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurrahman kemarin (19/11). Oman mengingatkan keputusan Arab Saudi yang sempat menutup sementara permohonan visa umrah Indonesia

harus jadi perhatian dan pelajaran.

Sesuai hasil rapat Kemenag dengan Komisi VIII DPR, Oman mengatakan ada sejumlah pesan untuk penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

► Baca **KEMENAG...Hal 7**

POLING CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU PILIHAN PEMBACA RB

	2	4.021
	1	3.700
	3	2.251

Patuhi Protokol Kesehatan #DENGAN SELALU GUNAKAN MASKER

LET'S GO TOYOTA BEYOND

INDULGE IN THE THRILL IN CHARGE OF BETTER FUTURE

COROLLA CROSS TWO SIDES OF THE FINEST

GASOLINE

HUBUNGI : AGUNG TOYOTA BENGKULU - J.P. Nataditja No.103 Telp. 0736 - 21127 HOTLINE BENGKEL : 0736 - 23035 BOOKING SERVIS : 08537776873

HUT KE - 52 PROVINSI BENGKULU

BENGKULU ESPORTS TOURNAMENT 2020

"Generasi Kreatif dan Sportif, Masa Depan Provinsi Bengkulu"

PUBG MOBILE MOBILE LEGENDS @Football PES2021 FREE FIRE

TOTAL HADIAH **RP. 100.000.000**

TERBUKA UNTUK NASIONAL! MAIN EVENT 21 - 30 NOVEMBER 2020 CONTACT INFO 0822 1092 2884 (Brados)

supported by rakyatbengkulu.com BASIA NEWS

POLING CABUP DAN CAWABUP SELUMA PILIHAN PEMBACA RB

2
EDISON-KHAIRI
306

3
ERWIN-GUSTANTO
20

1
SUPARTO-NOVIANAN
17



JEBOL: Saluran irigasi yang jebol sehingga tidak dapat mengalir lahan persawahan di Kelurahan Puguk, kemarin.

Irigasi Rantau Nipis Jebol

10 Ha Sawah Terancam Gagal Tanam

SELUMA - Sejumlah petani yang ada di Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara tengah resah. Pasalnya, akibat curah hujan yang tinggi membuat saluran irigasi Rantau Nipis Air Simpang jebol. Sehingga tidak dapat lagi menyuplai kebutuhan air ke lahan persawahan. Hal ini tentunya akan berdampak dengan gagal tanam. Oleh karena itu, perbaikan segera dirasa sangat diharapkan oleh para petani tersebut.

Lurah Puguk Kecamatan Seluma Utara, Darjoyo mengatakan bahwa irigasi Rantau Nipis ini jebol sejak Selasa (17/11) lalu. Dimana jebolnya irigasi ini akibat terjangkit arus sungai yang kian membesar setelah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Akibat jebolnya irigasi ini, air sudah tidak dapat masuk dan mengairi lahan persawahan warganya.

Setidaknya, ada 10 hektare sawah milik warga yang di-airi irigasi tersebut. Sehingga keberadaan irigasi ini sangat diperlukan oleh warga, un-

tuk mengairi lahan persawahan tersebut.

"Jika tidak segera diperbaiki maka dapat dipastikan lahan sawah yang siap tanam ini akan gagal ditanami warga, Maka dari itu kita berharap agar bisa segera diperbaiki sehingga bisa kembali berfungsi,"sampainya.

Darjoyo menambahkan jika irigasi ini tidak diperbaiki akan sangat berdampak pada warganya. Khususnya yang menggantungkan hidup dari sawah yang di-airi irigasi tersebut. Mengingat memang lahan persawahan warga itu mengandalkan

sumber air dari saluran irigasi tersebut. Sehingga minimnya air itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi. Terlebih lagi saat ini tengah memasuki waktu bercocok tanam.

"Semoga ada solusi terbaik yang diberikan Pemkab Seluma. Kami sangat berharap itu bisa segera diperbaiki," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Seluma, Ulil Umidi, S.Sos, M.Si meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat menindaklanjutinya. Selain itu, ia juga meminta masyarakat

untuk menyampaikan jebolnya irigasi ini ke DPRD Seluma. Tujuannya adalah agar bisa segera dianggarkan dan dapat diperbaiki. Mengingat saluran irigasi ini bersangkutan dengan masyarakat banyak khususnya para petani. Karena selain lahan sawah tadah hujan, lahan persawahan lainnya sangat bergantung dengan saluran irigasi.

"Segera sampaikan ke DPRD agar dapat di anggarakan segera mengingatkan bersangkutan dengan masyarakat banyak," pungkasnya.(cup)



PEMBEKALAN: Persiapan dan pembekalan untuk Satlinmas yang menjaga setiap TPS di Mapolres Seluma, kemarin.

Jelang Pilkada, Satlinmas Diberi Pembekalan

SELUMA - Dalam persiapan pengamanan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma pada 9 Desember nanti, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) diberikan pembekalan. Pembekalan tersebut dilakukan di Aula Endra Dharma Laksana Mapolres Seluma, Kamis (19/11) pagi.

Mengingat pelaksanaan Pilkada ini perlu didukung kesiapan yang mantap dan akurat baik teknis maupun perangkat perlindungan masyarakat yang profesional. Sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo SIK didampingi Wakapolres Seluma Kopol Napoleon SH mengatakan Satlinmas merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa. Organisasi ini dibentuk oleh lurah dan kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat (Linmas). Maka dari itu, pihaknya mengingatkan agar Satlinmas selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketertarikan serta ketertiban di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Tak lupa juga melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir," sampai Wakapolres.

Ditambahkan, Ketua KPU Seluma, Sarjan Efendi, SE menyampaikan bahwa untuk pemilih akan diberikan sarung tangan dalam pengambilan surat suara. Selain itu, anggota Linmas juga diminta untuk selalu memberitahu kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sewaktu pemilihan. Pihaknya berharap kepada anggota linmas yang berada di TPS dapat menjaga berlangsungnya pemilihan dengan tertib, aman dan kondusif. Dimana di setiap TPS sendiri ada 7 anggota KPPS dan 2 anggota Linmas.

"Ini harapan kita, kita minta Satlinmas ini bisa bekerja dengan baik dan membantu mengingatkan masyarakat di setiap TPS agar mentaati protokol kesehatan," jelasnya.

Sementara itu, Kasi Promkes Dinkes Seluma, Basar Hutabarat, SKM menjelaskan bahwa seseorang yang terinfeksi Covid-19 dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada batuk atau bersin.

Sehingga cara untuk mencegah penularan virus Corona dengan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas tetap meningkat.

Masyarakat juga diminta untuk tetap menggunakan masker saat berada di tempat umum. "Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Selalu pantau perkembangan penyakit Covid-19 dari sumber resmi dan akurat," pungkasnya.(cup)

Diduga Main HP Saat Berkendara, IRT Tewas

SELUMA - Kecelakaan lalulintas (Lakalantas) maut kembali terjadi di Kabupaten Seluma. Kali ini terjadi di lintas jalan Raya Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) pada Kamis (19/11) siang. Dimana seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Vera (35) warga Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu harus kehilangan nyawanya dalam peristiwa ini. Diduga lantaran sedang bermain Handphone (HP) saat berkendara, sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam bernopol BD 4208 PP bertabrakan dengan mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam bernopol BD 1165 KC yang diketahui kemudikan oleh Dwi Raharjo (27) warga Jalan SMK 1 Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

"Korban atas nama Vera mengalami patah kaki, luka di bawah

mulut dan diduga korban meninggal di tempat. Sementara rekannya, Eva Metri Yuliana mengalami luka di atas mata dan luka di kaki sebelah kanan," sampai Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, S.Ik melalui Kasat Lantas, Iptu Jangkung Riyanto.

Adapun kronologis kejadian terjadi bermula saat mobil Daihatsu Xenia melaju dari arah Kota Manana Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke arah Kota Bengkulu. Tepat di tungkungan Kelurahan Kembang Mumpo, datang sepeda motor dari arah yang berlawanan. Diduga pada saat itu, korban yang mengendarai sepeda motornya sedang memainkan Hp tak mampu mengendalikan laju sepeda motornya. Sehingga sepeda motor korban melebar dan mengambil jalur jalan yang berlawanan dan tabrakan pun tak terelakan lagi.

"Untuk Barang bukti kedua kendaraan yang terlibat kendaraan sudah di amankan di Mapolsek SAM," lanjut.

Kedua korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kembang Mumpo, sementara sopir maut telah diamankan di Mapolsek SAM. Dalam penanganan kasus Lakalantas MD ini, anggota Satlantas Polres Seluma dan unit Laka Polsek SAM telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti (BB).

"Kita masih melakukan penyelidikan atas kejadian lakalantas ini. Terkait dengan pengendara sepeda motor saat itu sedang memainkan HP belum dapat kita pastikan. Sebab kondisi HP korban tidak mengalami kerusakan apapun lecet. Itu informasi dari rekannya saja jika sebelum kejadian korban sempat menghubungi rekannya," pungkasnya.(cup)

Penyandang Disabilitas Segera Terima Bantuan

SELUMA - Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah memproses pengadaaan bantuan kepada para penyandang disabilitas berat. Setidaknya ada sekitar 40 penerima yang akan menerima bantuan berupa alat bantu disabilitas. Bantuan itu berupa alat seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar dan lainnya. Dimana penyalurannya sendiri ditargetkan telah selesai pada awal Desember nanti.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Herman SSoS melalui Kabid Perlindungan Jamsos dan Rehabilitasi, Aziman SE mengatakan bantuan ini memang secara rutin selalu diberikan setiap tahunnya. Yang mana untuk penerima sendiri bukan berdasarkan dari data yang dimiliki Dinsos Seluma melainkan dari pendaftaran. Setelah membuka pendaftaran calon penerima

bantuan, didapati ada sekitar 40 penyandang disabilitas yang mengajukan. Untuk anggarannya sendiri disediakan sekitar Rp 60 juta untuk pembelian alat bantu tersebut. Alat bantu sendiri berupa alat bantu dengar, alat bantu jalan dan alat bantu lainnya.

"Ya, pendaftaran telah ditutup, ada sekitar 40 orang yang mengajukan bantuan alat bagi penyandang disabilitas," ujar Aziman.

Ia menambahkan, bantuan tersebut rencananya akan dibagikan pada awal Desember nanti. Mengingat saat ini masih dalam proses pengajuan setelah Surat Keputusan (SK) telah dikeluarkan oleh Bupati Seluma. Penyaluran bantuan itu sendiri akan langsung diantarkan ke penerima. Mengingat jika bantuan itu disalurkan secara mengumpulkan massa tentunya akan menyulitkan para penerima. Maka dari

itu, pihaknya akan menurunkan tim untuk menyalurkan bantuan itu langsung ke rumah masing-masing penerima.

"Nanti bantuannya akan disalurkan langsung ke rumah masing-masing," lanjutnya.

Selain itu, Dinsos Seluma juga terus memperhatikan warganya yang menyandang disabilitas berat atau Orang Dengan Cacatan Berat (ODKB). Selain memberikan bantuan berupa alat bantu, juga ada bantuan lainnya berupa uang tunai. Setiap ODKB yang ada akan mendapatkan sembako dan uang tunai sebesar Rp 2 juta rupiah dalam setahun. Setidaknya, tercatat ada 67 orang yang terdaftar menjadi penerima bantuan tersebut.

Tahun depan, 67 penerima bantuan disabilitas berat itu kembali mendapatkan bantuan uang Rp 2 juta per tahun.(cup)

Musyawarah Gagal, Perangkat Desa Tetap Mundur

SELUMA - Dikarenakan adanya permasalahan dan ketidak cocokan antara perangkat dengan kepala desa membuat roda pemerintahan di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja tidak berjalan. Bagaimana tidak, lima orang perangkat desa saat ini telah mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Melihat hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma bersama kades setempat tengah menyusun rencana pelaksanaan seleksi ulang untuk kelima posisi yang kosong itu.

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma, Drs. Agus Jun Fadhillah mengaku bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini telah dilakukan upaya musyawarah. Namun, upaya musyawarah yang dilakukan dengan menghadirkan kades dan perangkat desanya tidak berjalan baik. Kelima perangkat desa yang mengundurkan diri itu lantas membuat roda pemerintahan desanya terhenti. Karena kelimaanya adalah sekretaris desa, bendahara, kaur pemerintahan, kaur kesra dan kaur pembangunan.

"Hanya ada satu cara yakni seleksi ulang, sebelumnya sudah ada upaya mediasi namun gagal,"sampaikan Agus.

Agus menambahkan, seleksinya sendiri direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihaknya menjadwalkan seleksi itu sesegera mungkin agar roda pemerintahan desa itu bisa kembali berjalan. Apalagi saat ini hampir memasuki akhir tahun dan masih banyak dana desa serta anggaran dana desa yang belum terealisasi dengan sepenuhnya. Tak hanya itu, seleksinya juga akan dilakukan dengan sesimpel mungkin namun tentunya tetap mengikuti peraturan yang ada.

"Seleksinya juga kita rencanakan itu sesimpel mungkin, ini untuk mengajar waktu, jangan sampai roda pemerintahannya tidak berjalan dan berimbas pada tidak terealisasinya DD dan ADD," jelasnya.

Selain itu, nanti pihaknya juga akan langsung memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa tersebut. Yakni agar bisa bekerja bersama-sama dan tidak ada kejadian serupa. Hal ini dapat terlaksana apabila kades dan perangkatnya memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan desa tersebut.

"Ya nanti akan diberikan sedikit wejangan, kita harap tidak ada lagi kejadian seperti ini," pungkasnya.(cup)

SH. TRUSS

RANGKA ATAP
BAJA RINGAN / KUDA - KUDA METAL
PENGANTI KAYU

- SH. TRUSS bebas perawatan
- SH. TRUSS Kuat, Ringan, dan Anti Gempa
- SH. TRUSS terbuat dari ZINCALUME / ALUZINC
- SH. TRUSS di jual batangan

Hubungi **SINAR HARAPAN**
Jl. Kibinbalu No.87 Kebun Tebang Bengkulu
Tlp. (0736) 21653, Hp. 0822 7838 6870

KUPWA

PT. NURTANI JAYA
Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprapto No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA

Hubungi :
PT. TRI GADING MAKMUR
Distributor Resmi Pelumas Pertamina
Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOUR ENGINE
PERTAMINA PELUMAS

PERTAMINA

SINAR HARAPAN ROOF
GENTENG METAL ZINCALUME®

Ready STOK

2 susun..?
6 susun..?
20 susun..?

Tidak Masalah..!!!
Menyediakan Truss / Rangka Baja Ringan

- Kwalitas Terbaik Dan Terjangkau
- Ringan Dan Mudah Mengikuti Bentuk Atap
- Anti Gempa Dan Angin Kencang
- Jarak Reng Bisa di Atur Sesuai Dengan Keinginan Anda Sehingga Anda Dapat Menghemat Reng

Hubungi **SINAR HARAPAN**
Jl. Kibinbalu No. 87, Kebun Tebang - Bengkulu
Phone (0736) - 21653, Hp. 0822 7838 6870



RSHD Kembali Buka Layanan Penuh

BENGKULU - Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu membuka secara penuh layanan bagi pasien non Covid - 19 atau umum pada masa penerapan new normal. Sebelumnya, beberapa layanan untuk pasien umum dibatasi pada masa penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Direktur RSHD dr. Lista Cerlyviera, MM, keputusan ini diambil saat menyambut penerapan new normal beberapa bulan lalu di Kota Bengkulu dengan kesiapan rumah sakit melayani pasien rawat jalan, rawat inap dan lainnya.

"Walaupun pelayanan telah dibuka kembali, kami memperketat tata cara pencegahan dari mulai persiapan hingga penerapan protokol kesehatan. Untuk pasien yang datang kita lakukan screening guna memastikan bebas dari Covid - 19. Apabila terindikasi Covid kita telah menyiapkan ruang penanganan khusus," ujar dr. Lista Cerlyviera saat diwawancarai, Senin (16/11/2020).

Ia juga menambahkan bahwa semua persiapan telah dilakukan RSHD saat pelayanan di masa new normal. "Semua persiapan telah kita lakukan mulai dari pengecekan suhu tubuh di depan pintu masuk, pengaturan tempat tidur pasien dengan jaga jarak, menyiapkan handsanitizer setiap sudut ruangan, melakukan desinfeksi secara rutin pagi dan sore di lingkungan rumah sakit, melakukan screening terhadap pasien maupun keluarga dan menerapkan langkah - langkah standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan telah membagikan jadwal sesuai dengan hari yang telah ditentukan," jelas dr. Lista.

Selain itu, dr. Lista berpesan kepada masyarakat agar tidak takut untuk rujukan ke RSHD. Karena RSHD telah membuka kembali pelayanan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan saat menangani pasien yang ada. (**)

Layani 1000 Pasien RSHD Kedepankan SOP dan Prokes Covid-19

BENGKULU - Sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kota Bengkulu sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur, Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu telah melakukan berbagai persiapan maupun pelayanan prima terhadap para pasien yang terpapar Covid-19 dari awal munculnya virus Covid-19 hingga saat ini.



LISTA CERLYVIERA

Dengan berbagai variasi dalam penanganan Covid-19, RSHD selalu menjalankan penanganan sesuai dengan standar operasional (SOP) yang berlaku. Hal ini diungkapkan Direktur RSHD dr. Lista Cerlyviera, MM saat diwawancarai, Senin (16/11). "Selaku rumah sakit rujukan penanganan Covid-19. Tentu kita selalu melakukan penanganan sesuai SOP dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan dalam penanganannya. Untuk itu, kita selalu meminta masyarakat selalu mengedepankan protokol kesehatan dan selalu mengikuti SOP yang telah berlaku," ujar dr. Lista Cerlyviera.

Setelah itu, Direktur RSHD dr. Lista Cerlyviera menjelaskan jumlah pasien yang pihak mereka tangani selama pandemi Covid-19 berlangsung. "Ya, hampir 9 bulan pandemi Covid-19 ini ada di lingkungan kita. Dari awal hingga saat ini ada sekitar 1000 pasien telah kita tangani dari mulai rawat inap, rawat jalan maupun hanya sekedar konsultasi. Pasien yang dirawat jumlahnya sekitar 25-35 dengan variasi hari rawatnya yang berbeda tergantung penyakit bawaan yang ada," tambahnya.

Karena sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, RSHD telah mempersiapkan segala kemungkinan apabila tenaga kesehatan (nakes) terinfeksi virus dan meminimalisir agar tidak terinfeksi. "Apabila ada yang terinfeksi nantinya akan ada lokalisasi ruangan dimana awal infeksi tersebut didapatkan. Kita juga selalu melakukan protokol kesehatan dalam menangani pandemi dan sudah ada zona-zona yang ditentukan dalam menangani pasien dengan melakukan lokalisasi tempat dimana ia diletakkan," tutur dr. Lista Cerlyviera

Sesuai dengan SOP yang berlaku, dr. Lista Cerlyviera mengimbau masyarakat untuk tidak takut datang ke rumah sakit. "Karena penanganan kita sesuai dengan SOP. Jadi kita minta masyarakat tidak perlu takut datang ke rumah sakit. Karena pasien covid sudah tentu pelayanan berbeda dengan pelayanan umum. Tetapi dimasa Covid ini sangat perlu pengertian masyarakat dengan tetap menjalankan SOP yang berlaku dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dimasa pandemi ini memang kita harus detail memeriksa dan menentukan pasien. Apabila tidak detail takutnya pasien yang diperiksa terinfeksi Covid-19 malah kita letakkan di ruangan pasien yang tidak terinfeksi. Tentu itu sangat berbahaya dan fatal, makanya kami minta pengertian masyarakat untuk kebaikan seluruh pihak harus mengikuti SOP dan prokes," jelas dr. Lista.

Sementara itu, dalam meminimalisir agar tenaga kesehatan tidak terpapar Covid-19. Pihak RSHD melakukan berbagai upaya dalam menanganinya. "Dalam meminimalisir tenaga kesehatan agar tidak terpapar kita melakukan sistem piket. Piket yang paling rawan ialah di ruang IGD dan isolasi. Kita akan tetap melakukan prokes yang ada, salah satunya dengan memakai alat pelindung diri (APD) sesuai level dimana mereka ditempatkan. Selain itu, kita juga lakukan screening rutin, memberikan makanan yang bergizi hingga memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan yang bertugas," ungkap dr. Lista.

Dalam kesempatan ini, dr. Lista mengucapkan terimakasih atas dukungan seluruh pihak yang membantu RSHD. "Saya ucapkan terimakasih dengan seluruh pihak yang telah terlibat khususnya Bapak Walikota dan Wakil Walikota yang terus memperhatikan kami dengan memberikan bantuan dalam menangani virus ini. Semoga virus ini cepat berakhir dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan akibat virus ini," pungkasnya. (**)



PEDULI: Plt Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi didampingi Direktur RS Harapan dan Doa dr. Lista Cerlyviera, MM menjenguk pasien yang dirawat di RS Harapan dan Doa.

Luncurkan Inovasi Pelayanan Prima

BERBAGAI INOVASI RSHD KOTA BENGKULU

- MAKAN GRATIS**
- PENGANTARAN PULANG PASIEN KE RUMAH**
- SALON GRATIS**
- KATERING UNTUK PENGIDAP PENYAKIT KRONIS**

BENGKULU - Wujud pelayanan prima terhadap pasien maupun keluarga pasien, Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu meluncurkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Bertujuan memberikan pelayanan prima untuk pasien maupun keluarga pasien.

Inovasi pelayanan yang diluncurkan dan yang sudah berjalan ialah makan gratis untuk keluarga pasien dan salon gratis untuk pasien yang telah sembuh saat di rawat RSHD. Berbagai inovasi ini diberikan Direktur RSHD dr. Lista Cerlyviera, MM saat diwawancarai, Senin (16/11/2020).

"Inovasi makan gratis dan salon gratis ini terus kita jalankan selama ini, tetapi karena sekarang pandemi Covid-19 jadi program ini berhenti sementara. Tapi programnya ya tetap ada," ujar dr. Lista Cerlyviera.

Selain inovasi tersebut, dr. Lista Cerlyviera juga membeberkan inovasi lainnya yakni pengantaran pulang pasien ke rumah. "Ya, pasien yang sudah sembuh kita antarkan pulang ke rumah.

Ini suatu yang inovasi saati ini kami kembangkan. Jadi, kita sediakan transportasi penjemputan pasien dan apabila ia sudah sembuh langsung kita antarkan pulang. Semoga program ini dapat membantu pasien yang membutuhkan transportasi apabila pasien tersebut tiada kendaraan," jelas dr. Lista.

Ke depannya, pihak RSHD akan meluncurkan program inovasi terbarunya yakni katering untuk pengidap penyakit kronis, contohnya pasien Diabetes Mellitus (DM), pasien Hypertens, pasien Malnutrisi, dan lain lain.

"Inovasi ini telah kita siapkan sebelumnya. Jadi pasien yang mengidap penyakit ini (kronis) memerlukan nutrisi dan kalori yang seimbang yang sudah dikonsultasikan pada bagian gizi atau nutrisio-nis. Selain itu, kita juga kembangkan semacam delivery makanan untuk masyarakat kondisinya yang cocok makan seperti apa, dan akan kita siapkan asupan yang sesuai dengan keperluan nutrisinya," pungkasnya. (**)



SEMBUH DAN BAHAGIA: Pelepasan pasien yang telah sembuh diberikan bingkisan dan diantar gratis menggunakan mobil dari RS Harapan dan Doa.



KOMPAK: Jajaran RS Harapan dan Doa Kota Bengkulu



INOVASI: RS Harapan dan Doa ikut membantu pengendalian lingkungan Go Green melalui inovasi Bank Sampah.



SOP: Aktivitas penyemprotan disinfeksi di RS Harapan dan Doa.



Dokumen, Laptop dan Stempel Disita

Usut Dugaan Korupsi DD Air Umban

KOTA MANNA - Penyidik Kejari Bengkulu Selatan (BS) kemarin lusa (18/11) telah melakukan pengeledahan di kantor Desa Air Umban, rumah kepala desa Air Umban dan kantor Dinas PMD BS. Pengeledahan itu untuk mengumpulkan barang bukti dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) desa Air Umban Kecamatan Pino tahun anggaran 2016 sampai 2019 yang

tengah diusut Kejar BS. "Ya pengeledahan di beberapa lokasi itu guna mendukung upaya kegiatan penyidikan dalam penyelesaian perkara," kata Kajari BS, Nauli Rahim Siregar, SH didampingi Kasi Pidsus, Marjek Ravilo, SH dan Kasi Intel, M. Ichsan. Dalam upaya pengeledahan itu, tiga jaksa menyita dokumen yang diperlukan dalam penyidikan perkara yang sedang berjalan. Di antaranya surat pertanggungjawaban (Spj), dokumen

pajak, dokumen SK 2, buku kas, satu unit laptop bendahara desa, cap rekanan. "Beberapa sudah disita, termasuk cap yang diduga dipalsukan," tambahnya. Adapun tempat yang didatangi penyidik adalah kantor desa, kemudian dilanjutkan ke rumah kades dan terakhir di kantor Dinas PMD. Pengeledahan di kantor desa disaksikan oleh kades Air Umban, Suit Iman dan perangkatnya. Begitu juga pengeledahan di rumah kades juga disaksikan oleh

kades dan anak kades yang merupakan bendahara desa tersebut. Selanjutnya, dokumen yang disita dari pengeledahan tersebut akan dipelajari lebih lanjut oleh penyidik. Dokumen yang nantinya berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani akan dijadikan sebagai penguat dalam proses pengusutan kasus tersebut. "Dipelajari dulu semua dokumennya yang disita, nanti itu dijadikan bahan penyidikan," tutupnya. (tek)



GELEDAH: Jaksa Kejari BS saat melakukan pengeledahan di kantor Desa Air Umban terkait dugaan korupsi DD.

POLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN PILIHAN PEMBACA RB

HARTAWAN-DARMIN
1
51

GUSNAN MULYADI-RIFAI TAJUDDIN
3
17

BUDIMAN ISMAUN- HELMI PAMAN
2
11

DEWI SARTIKA-MARWAN ISWANDI
4
7



MINTA: Pjs Bupati minta para ASN Pemkab BS ikut menyukseskan Pilkada dan melakukan sosialisasi.

ASN Diminta Sukseskan Pilkada 2020

KOTA MANNA - ASN Pemkab Bengkulu Selatan (BS) diminta untuk berpartisipasi menyukseskan Pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. Hal tersebut disampaikan Pjs Bupati Isnan Fajri, M.Kes saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Manna, kemarin (19/11). Dikatakan Isnan, Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU BS semata, namun Isnan menyebutkan tanggung jawab menyukseskan jalannya pilkada juga tanggung jawab masyarakat BS dan tentunya ASN Pemkab BS. "Suksesnya Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Namun

juga segenap jajaran pemerintahan dan ASN," tegas Isnan. Kepada ASN dan jajaran pemerintahan, baik di tingkat kecamatan sampai ke pemerintahan desa diminta untuk mensosialisasikan Pilkada 2020. "Salah satu indikator sukses atau tidaknya Pilkada dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Pemilu lalu partisipasi pemilih di BS mencapai 80 persen. Pilkada nanti, kita lihat apakah naik atau turun. Kalau partisipasi pemilihnya tinggi merupakan satu indikator bahwa Pilkada sukses, tugas kita semua untuk mensosialisasikan agar partisipasi pemilih di pilkada nanti tinggi," imbau Isnan.

Dalam upaya menyukseskan Pilkada ini pula, Pjs Bupati meminta Kepala pemerintahan kecamatan dan desa agar melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum memiliki KK dan NIK. Di samping untuk kepentingan administrasi kependudukan, hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari terjadinya masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilih. "Kalau masih ada masyarakat yang belum punya NIK dan KK, silakan pemerintah desa diurus dan diusulkan secara kolektif ke Disdukcapil BS. Karena NIK dan KK ini merupakan dasar penting untuk data pemilih," demikian Isnan. (tek)

Gelapkan HP Teman untuk Beli Tuak

KOTA MANNA - Tidak patut ditiru apa yang dilakukan dua pemuda ini yakni Ar (16) dan Pu (22), warga Kelurahan Pasar Bawah, Pasar Manna. Hanya karena ingin beli tuak dan mabuk, keduanya nekat menggelapkan HP Oppo A12 milik korban Mansyur (17) warga Bungamas yang tidak lain teman kedua pelaku. Kapolres BS, AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK didampingi Kanit Pidum, Ipda. M. Bintang Azhar mengatakan tidak lama setelah kejadian korban langsung melapor ke Polres BS. Adapun kronologisnya diceritakan Kasat Reskrim, penggelapan HP korban oleh kedua tersangka, Minggu (15/11) malam sekitar pukul 19:35 WIB di Taman Merdeka, Kota Manna. Saat itu HP korban di pinjam temannya bernama Ebi (17) warga Kelurahan Pasar Bawah, Pasar Manna. Setelah itu datang AR yang disuruh oleh PU untuk mengambil HP dari tangan Ebi. lalu setelah mengambil HP

korban di tangan Ebi, kedua pelaku pergi dan menggadai HP tersebut kepada orang lain sebesar Rp 100 ribu. "Jadi HP korban itu digadai kedua pelaku Rp 100 ribu dan uangnya dibelikan minuman tuak," jelas Kasat Reskrim. Saat ini Kasat mengakui kedua pelaku telah diamankan di sel tahanan Polres BS. Kedua pelaku diamankan oleh Tim Opsnal Polres BS tidak lama setelah korban melaporkan kejadian itu. "Keduanya ditahan Rabu malam (18/11). Keduanya ditahan dulu di sel tahanan Mapolres BS," ungkap Kasat Reskrim. Sementara itu dari keterangan salah pelaku yaitu AR, keduanya nekat menggelapkan HP temannya lantaran tidak mempunyai uang. Lalu melihat ada kesempatan keduanya memberanikan diri meminjam HP milik korban dan digadai. "Uangnya untuk beli tuak pak, saat itu terpaksa kami pinjam dan gadai HP nya," ungkap AR dihadapan penyidik Reskrim. (tek)

Pegawai KPU Rutin Cek Kesehatan

KOTA MANNA - Tidak ingin ada kendala sedikitpun dalam penyelenggaraan Pemilu 2020, KPU Bengkulu Selatan (BS) memastikan seluruh pegawai KPU BS sehat. Untuk itu KPU BS merutinkan seluruh pegawai cek kesehatan. Komisioner KPU BS Aspran Toni, SE mengaku, seluruh pegawai KPU dalam keadaan sehat dan siap menjalankan seluruh tahapan Pilkada serentak 9 Desember. Guna menjamin kesehatan tersebut, diakui Aspran pihaknya rutin cek kesehatan oleh tim medis. Dijelaskan Aspran, hal tersebut sangat penting dilakukan bagi semua petugas KPU, karena suksesnya

Pilkada berkat kerja keras dan sehat seluruh elemen petugas KPU dari desa hingga kecamatan. "Penting, ini tidak kalah pentingnya dari seluruh tahapan Pilkada, kesehatan petugas harus terjamin makanya kami rutin cek kesehatan," terang Aspran. Untuk pemeriksaan komisioner KPU dan staf, pihaknya mendatangkan petugas kesehatan ke sekretariat KPU BS. Kemudian semua komisioner KPU beserta staf di cek kesehatan mulai pengecekan tekanan darah hingga pemberian vitamin. Selain itu ditambahkannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, untuk menjaga stamina dan imunitas penyelenggara. (tek)

Berantas Habis Peredaran Narkotika

Kapolres Ingatkan Anggota

KOTA MANNA - Peredaran Narkotika jenis sabu di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) hingga saat ini masih belum habis. Untuk itu Satnarkoba Polres BS komitmen menumpas habis peredaran barang haram tersebut. Lebih kurang 30 kasus Narkotika berhasil ditangani

Satnarkoba Polres BS dalam kurun waktu enam bulan. Ini menunjukkan peredaran Narkotika di BS masih ada cela dan perlu ditingkatkan dalam memberantasnya. Satnarkoba Polres BS berkomitmen menumpas habis jenis Narkotika, mulai dari sabu hingga obat-obatan tanpa resep dokter. Kasat Narkoba Polres BS Iptu. Welliwanto Malau, S.IK, MH mengatakan, jumlah kasus narkoba tersebut

cukup tinggi. Peredaran narkoba di BS sebut Malau bukan hanya dari lokal, namun masih ada pemasok yang nekat membawa sabu ke BS melalui berbagai modus. Kendati demikian, dia mengakui pihaknya tidak pernah bosan dan berkomitmen peredaran narkoba harus ditumpas habis. Sebab jelas Malau pengaruh narkoba sangat merusak bahkan membawa kematian.

"Sejak awal tugas di BS komitmen bersama tumpas habis peredaran Narkotika, dan jenis lainnya. Pengawasan terus dilakukan masyarakat mohon bantuannya, melapor kalau ada yang mencurigakan di lingkungan," ujar Malau. Sementara itu, Kapolres BS AKBP Deddy Nata, S.IK mengingatkan seluruh anggota untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba dan lainnya. Apabila ter-

bukti Kapolres menegaskan sanksi hingga pemecatan dari lembaga Polri bukan tidak mungkin. Selain itu dia mengajak setiap satuan Polres BS aktif mensosialisasikan bahaya dan dampak obat-obatan pada masyarakat BS. "Tidak boleh ada anggota bermain Narkoba, itu pelanggaran berat. Giatkan sosialisasi ke masyarakat, ayami warga," ungkap Deddy. (tek)

PWI BS Temui Pjs Bupati

KOTA MANNA - Jelang pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu Selatan (BS) tanggal 26 November mendatang, pengurus PWI BS menemui Pjs Bupati BS Isnan Fajri, M.Kes kemarin (19/11). Pertemuan ini dilakukan PWI BS sebagai langkah awal PWI BS kembali aktif. Setelah sekian lama vakum, hampir 15 tahun lebih, PWI BS mulai membentuk kepengurusan anggota baru. Oleh sebab itu, seluruh anggota PWI BS yang baru siap dilantik oleh pengurus PWI Provinsi Bengkulu. Dalam menuju proses pelantikan ini, PWI BS tidak lupa berkoordinasi dengan pihak Pemda BS sebagai mitra kerja selama ini. Oleh sebab itu PWI BS mendatangi Pjs bupati untuk mendapat-



KOORDINASI: Ketua PWI BS Suswadi melakukan pertemuan dengan Pjs Bupati BS Isnan Fajri guna koordinasi jelang pelantikan anggota PWI BS.

kan arahan dan juga masukan pada pengurus PWI BS yang baru. Kedatangan PWI BS diterima dengan baik oleh Pjs Bupati dan dalam kesempatan itu Isnan mengakui peran wartawan sangat penting dan melalui organisasi PWI dia berharap pers semakin baik dalam membangun kemajuan daerah.

merupakan kabupaten besar yang telah melahirkan dua Kabupaten lain yaitu Kaur dan Seluma. "BS butuh kekuatan untuk kemajuan, apalagi BS sebagai kabupaten induk. Inilah saling mengingatkan dan saling koreksi membangun. Jangan saling cari kelemahan," pesan Isnan pada PWI BS. Sementara itu Ketua PWI BS yang baru akan dilantik Suswadi mengakui adanya PWI sebagai tempat perlindungan para wartawan dalam menjalankan tugas. Sebab selama ini ungkap Wadi tidak jarang wartawan mendapatkan perlakuan kurang baik dari narasumber dan juga oknum. "Intinya pertemuan dengan Pjs bupati koordinasi jelang pelantikan PWI," singkat Wadi. (tek)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA BENGKULU
Jl. Sadang Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu 38225
Telp: 0736-26294, Faksimile: 0736-346177
E-mail: ut-bengkulu@ecampus.ut.ac.id

UNIVERSITAS TERBUKA (UT) BENGKULU
Mengucapkan selamat kepada alumni UT yang telah diterima sebagai CPNS tahun 2019/2020

No.	Nama	Program Studi	NIM	Pokjar	Penempatan
1.	Ernawat Gea, S.Pd.	PGSD	824490151	Ipuh	Benteng
2.	Sepuan, S.Pd.	PGSD	823142373	Ipuh	Mentawai
3.	Trizki Feza, S.IP	Ilmu Pemerintahan	018674006	Lebong	Seluma
4.	Dede Syaifulah, S.Ap.	Ilmu Administrasi Negara	017482515	Ketahun	BAPPEDA Seluma
5.	Maman Suryaman, S.Pd.	PGSD	815394324	Ketahun	Seluma
6.	Eva Sulastris, S.Pd.	PGSD	823063246	Ketahun	Lebong
7.	Eka Hastuti Harimurwani, S.Pd.	PGSD	819474368	Ketahun	Benteng
8.	Yunita, S.Pd.	PGSD	815511537	Ketahun	Bengkulu Tengah
9.	Maya Riawati Masrianun Harahap, S.Pd	PGSD	835982721	Ketahun	Lebong
10.	Ulam Syari, S.Pd.	PGSD	821902235	Argamakmur	Lebong
11.	Julia Puspitasari, S.Pd.	PGSD	824565081	Argamakmur	Lebong
12.	Dewi Astutik, S.Pd.	PGSD	821932997	Argamakmur	Lebong
13.	Turi Kurniah, S.Pd.	PGSD	821914967	Argamakmur	Lebong
14.	Wilson, S.Pd.	PGSD	823152643	Manna	Palembang
15.	Eva Haryanti, S.Pd.	PGSD	821906841	Manna	Seluma
16.	Etri Royani, S.Pd.	PGSD	821903008	Manna	Seluma
17.	Haryoko, S.Pd.	Pend. PKN	016662203	Argamakmur	Bengkulu Utara
18.	Sri Wahyuni, S.Pd.	Pend. PKN	017219725	Argamakmur	Bengkulu Utara
19.	Rika Novia, SE	Manajemen	017874383	Curup	BKPSDM
20.	Linda Yanuanti, S.Pd.	PGSD	819982799	Seluma	Seluma

Selamat dan sukses, semoga amanah, dapat menjalankan tugas dengan baik, dan menunjukkan kinerja yang baik.

Direktur UT Bengkulu
Dr. Yumiati, M.Si.

INFO HOTEL

HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX / HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	Jl. Bakti Husada No. 88 Kel. Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	Jl. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

POLING CABUP DAN CAWABUP KAUR PILIHAN PEMBACA

1

67

GUSRIL PAUSI MEDI YULIARDI

2

15

LISMIDIANTO HERLIAN M

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

"Mari Kita Jaga Kabupaten Kaur Dari Covid - 19, Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan"

Hj. Vellio Suti Satri, S.KM Nandar Munadi, S.Sos, M.Si Sekda

LINTAS

22 November Cetak Surat Suara

KOTA BINTUHAN - Berbagai persiapan untuk Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten Kaur terus dilakukan oleh KPU Kaur. Bahkan beberapa logistik untuk pilkada sudah tiba di gudang KPU Kaur. Mulai dari kotak suara, bilik suara, kemudian ada juga tinta dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.

Saat ini, KPU Kaur sudah merencanakan cetak surat suara. Ketua KPU Kaur Meixxsy Rismanto mengatakan, proses pembuatan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kaur pun sudah jalan. Bahkan kalau tidak ada halangan tanggal 22 November 2020 yang akan datang surat suara untuk pilkada Kaur sudah naik cetak.

Diperkirakan sekitar 25 November yang akan datang, surat suara sudah bergeser dari Jakarta ke Kaur dengan pengawalan ketat dari pihak Polres Kaur. Tiba di Kaur sekitar tanggal 27 November. Setelah itu baru dilakukan penyusunan dan pelipatan surat suara sesuai kecamatan desa dan TPS yang ada di Kaur. "Yang pasti untuk Kaur surat suara baru akan naik cetak itu tanggal 22 November setelah semua siap tanggal 25 November baru proses pengiriman ke Kaur. Kita doakan semua berjalan lancar dan aman. Dan saat cetak hingga pengiriman surat suara semua dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum nantinya," ungkap Meixxsy Rismanto. (cik)

Rekonstruksi Kasus Perkosaan Cucu Tiri

KOTA BINTUHAN - Kasus pemerkosaan cucu tiri yang dilakukan oleh kakek berinisial Mu (75) warga Kaur Selatan Kabupaten Kaur sudah dilimpahkan dari penyidik PPA Polres Kaur ke Kejari Kaur. Jika tidak ada halangan, dalam waktu dekat pihak Polres dan Kejari Kaur akan melakukan rekonstruksi pemerkosaan terhadap Bunga (14) bukan nama sebenarnya. Untuk jadwalnya, penyidik Polres Kaur akan berkoordinasi dengan pihak Kejari Kaur.

"Untuk berkas perkara kakek cabul masih perbaikan dan akan segera kita lakukan dalam waktu dekat. Kita juga akan menggelar rekonstruksi bersama penyidik Pidum Kejari Kaur nantinya, namun waktunya masih belum kita pastikan. Mudah-mudahan kasus ini segera kita limpahkan ke pihak Kejari Kaur untuk proses persidangan," ungkap Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono didampingi Kasat Reskrim AKP Apriadi melalui Kanit PPA Aipda Andi Sujarmoko, SH.

Kasus ini tampaknya menjadi prioritas dari penyidik Sat Reskrim Polres Kaur untuk diselesaikan karena tersangka Mu sudah berusia lanjut. Sehingga penanganannya pun harus dipercepat. Apalagi pemeriksaan keterangan terdangka dan korban sebut saja Bunga (14) telah rampung dilakukan penyidik PPA Polres Kaur.(cik)



MENUMPUK: Nampak tumpukan batu hias yang disusun karena belum ada permintaan dari pulau Jawa di salah satu kediaman penjual batu hias di Kaur kemarin.

Proyek Embung Tunggu Audit BPKP

KOTA BINTUHAN - Pengusutan dugaan korupsi pembangunan embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur nampaknya terus berlanjut. Apalagi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Serta pengeledahan di beberapa tempat untuk mencari bukti dugaan korupsi pembangunan embung tahun anggaran 2019 tersebut.

Sejak terkena bencana alam dan tertimpa longsor, sampai saat ini embung diharapkan dapat menjadi sumber air petani sawah di Desa Babat Kecamatan Tetap tidak berfungsi dengan baik. Kasus ini pun mencuat hingga dilaporkan warga ke Kejari Kaur.

Kendati demikian pihak desa mengakui kalau pembangunan embung sudah sesuai dengan prosedur. Hanya saja pertumbuhan longsor.

Untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh pembangunan embung yang bersumber dari APBN tahun 2019 sebesar Rp 320 juta itu, saat ini pihak Kejari Kaur tinggal menunggu hasil audit dari BPKP Bengkulu yang sedang berjalan.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH didampingi Kasi Pidsus Alman Noveri, SH, MH melalui Kasi Intelijen A.

Gufroni kepada RB.

Pihak Kejari Kaur memastikan akan menginformasi perkembangan kasus pembangunan embung dan siapa saja yang terlibat nantinya. Karena pekerjaan pembangunan embung tahun 2019 bukan termasuk dana desa (DD) namun dana dari KPDT untuk Desa Babat. Dan pekerjaannya pun dikerjakan oleh masyarakat melalui TPK yang telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan.

"Untuk pembangunan embung di Babat masih dalam proses untuk saat ini kita masih menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui ada atau tidak kerugian negaranya. Sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan saksi dan juga pengecekan ke lokasi serta pengeledahan baik itu di PMD dan juga rumah kades," ungkap A. Gufroni.

Pemeriksaan saksi diperkirakan akan terus dilanjutkan nanti setelah keluarnya hasil audit dari BPKP. Mereka yang diperiksa sebagai saksi terdiri dari, pihak desa, Dinas PMD Kaur dan Kementerian PDT.

Embung tersebut panjangnya 25 meter dengan lebar 20 meter dan tinggi 2,1 meter. Pembangunannya pun dilakukan oleh masyarakat desa melalui tim pengelola kegiatan (TPK) yang telah dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. (cik)

Permintaan Batu Hias Menurun

KOTA BINTUHAN - Sejak pandemi Covid-19 banyak usaha jalan di tempat bahkan ada yang gulung tikar. Hal ini dirasakan sekali oleh pengusaha perhotelan walaupun mulai kembali ada pengunjung. Usaha batu hias di Kaur saat ini juga dalam kondisi lemah. Permintaan batu hias dari pulau Jawa menurun.

Akibatnya saat ini banyak batu-batu hias yang menumpuk di lokasi pengumpulan atau toke batu. Hal ini tentunya juga berdampak pada pengumpul dan pencari batu hias.

"Untuk saat ini memang permintaan dari pulau Jawa untuk batu hias sangat sepi, apalagi sejak zaman Covid-19 ini. Karena banyak orang belum memikirkan batu hias dan masih fokus mengatasi persoalan Covid-19. Tidak hanya itu saja, saat ini banyak kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan akibat Covid-19, sehingga berdampak pada kami penjual batu hias," ungkap salah satu penjual batu hias di Kaur Sinarmen.

Karena pengiriman batu hias saat ini kurang, pengambilan batu hias di wilayah Sulawangi pun nampak tidak seramai dulu. Bahkan pemilihan batu hias di depan rumah-rumah warga pun tidak nampak lagi seperti dulu. Kendati demikian Sinarmen dan rekan-rekannya tetap yakin usaha batu hias ini tetap akan kembali lancar di awal tahun 2021 yang akan datang. Apalagi kasus Covid-19 untuk saat ini tidak seperti awal-awal yang lalu.

"Untuk akhir tahun ini kita pastikan tidak akan ada lagi penjualan batu hias ke Jawa karena sudah banyak kegiatan selesai dan dampak Covid. Namun awal tahun mudah-mudahan kembali bisa jalan. Apalagi Covid-19 tidak seheboh awal-awal yang lalu dan banyak kegiatan yang tertunda akan kembali dilanjutkan awal tahun 2021," pungkash Sinarmen.

Untuk diketahui mulai dari wilayah Bengkulu Selatan hingga perbatasan Kaur merupakan wilayah potensi batu hias. Karena sepanjang pantai terdapat batu hias yang menarik, mulai dari yang bulat, hitam dan sebagainya. Dan ini banyak dimanfaatkan IRT untuk menambah penghasilan keluarga dan membantu suami dengan mencari batu hias di pantai. Saat ini kegiatan itu nampak sepi karena permintaan akan batu hias saat covid-19 ini menurun. (cik)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAUR

PENGUMUMAN
Cmentang bertingkat (Hibung)

Daftar nama pemegang hak yang telah selesai proses pendaftaran hak yang akan diterbitkan sertifikat hak milik berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

No.	Nama Pemohon	Judul Tanah	Luas Tanah	Tanggal Pendaftaran	Lokasi Tanah	Kecamatan
1.	PT. BUKIT KABA POLDA BENGKULU	Perumahan	10000 m ²	22-09-2014	Kaur	Babat

Dasar permohonan hibung berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tanggal 11-11-2014. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur.

Hal. Kabupaten : 18730/2020
Nama Pemohon : PT. BUKIT KABA POLDA BENGKULU
No. Sertifikat : 18730/2020

Wakil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur
RASHANGKUS INDARTO, S.H., M.Si., M.Kn.
NIP. 19640227 198503 1 002

Kapolres Kaur dan Anggota Rapid Test

KOTA BINTUHAN - Untuk mengantisipasi anggota terpapar Covid-19, jajaran Polres Kaur kemarin (19/11) menggelar kegiatan rapid test. Tidak hanya anggota saja, bahkan Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono juga menjalani rapid test. Bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidak anggota yang terpapar atau pun mengalami gejala

yang diakibatkan virus Corona. Rapid test yang dilakukan kemarin lebih fokus kepada anggota Polres Kaur yang baru pulang dari Dikbangdes di SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu.

Pengecekan kesehatan bagi anggota yang baru pulang dari luar daerah memang menjadi prosedur protokol kesehatan dari pemerintah daerah dan juga Polres Kaur. Ada 34 anggota yang menjalani rapid test. Anggota di bagian pelayanan juga jalani rapid test. Kegiatan ini dipusatkan di ruang Dokkes Polres Kaur yang dipimpin langsung oleh Pa. Urkes, Henni, S.Kep.

Ners. "Sesuai dengan prosedur kita semua anggota yang baru pulang dari menjalankan tugas atau pendidikan di luar Kaur saat pulang wajib rapid test. Ini salah satu bentuk antisipasi covid-19 di jajaran Polres Kaur. Dan alhamdulillah semuanya sehat dalam dalam kondisi baik hasilnya juga seperti yang kita harapkan," ungkap Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang datang ke Polres Kaur juga wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (cik)

PUSAT OBAT KUAT IMPORT/TOCKER
VIMAX OIL & LINTAH OIL
(satu Menit Dioloes Langsung Reaksi Tambah Besar dan panjang)

- ~ **VIMAX OIL** : Menambah ukuran penis tambah besar, tambah panjang 1 x oles langsung reaksi. Hasilnya dalam (3 x pemakaian) permanen untuk selamanya.
- ~ **PROKOMIL SPRAY** : Khusus untuk tahan lama kuat ereksi 1 x oles tahan untuk satu malam.
- ~ **Sony Tablet**: Mengobati penyakit yang sudah lama diderita : L. Syahwat/Impotensi, K. Manis, M. Encas, Sakit Pinggang, Sakit Gula, Reumatik, cepat membuang serta memproduksi sperma pria. Menambah kekuatan hubungan suami/istri 100% patent. Tanpa efek samping telah banyak terbukti.....
- ~ **CREAM PAYUDARA** : Membesarkan, memadamkan, memotokan PAYUDARA, menghilangkan keriput lembek. Hasilnya (3 x oles) langsung kelihatan permanen untuk selamanya.
- ~ **JUGA TERSEDIA** : P. Langsing, P. Gemuk badan, Pemutih wajah, Peninggi Badan/Pembangkit gairah wanita (prigid) menjadi normal, Juga tersedia berbagai merk Jamu import yang lain. Tersedia accessories untuk pria/wanita yang super canggih, antik dan modern.

HUBUNGI DISTRIBUTOR **HU - SENG**
Jl. Tenggiri No.20 Depan Pasar Ikan
Kampung Cina Kota Bengkulu
HP. 0821 8270 7707

Pesanan : Dalam kota diantar - luar kota dikirim

Dukung KPR Bank **BTN**

BERKAH KANDANG MAS 3

RUMAH TYPE 36 SUBSIDI

Jl. Sumas Raya / Jl. Kandang Mas 3 BENGKULU

Kualitas Komersil
Lokasi Strategis
Bebas Banjir

DP cukup 5 Jt
Terima Kunci
***SKB**

Segera Hubungi !

Angsuran Mulai Rp. 877.741,-

0853 8129 3398
0853 8198 0149 **STOK TERBATAS..!**

PT. BERKAH IDAMAN MANDIRI
CONTRACTOR - DEVELOPER - TRADING
Jl. Tri Brata No. 11 Telp. (0736) 52319 Bengkulu. Email : bim_bkl@yahoo.com

FREE ANGSURAN 3 BULAN
Khusus Tipe Mobilio

DP MULAI 19 *Juta
DP MULAI 20 *Juta

ARISTA
Terbaik dan Terpercaya

Info lebih lanjut kunjungi :
<https://honda.arista-group.co.id/dealer/honda-arista-bengkulu>

Jam Buka Showroom
Penjualan : Senin-Sabtu Jam 08.00-19.30 WIB
Minggu Jam 08.00-16.00 WIB
Bengkell : Senin-Sabtu Jam 08.00-17.00 WIB
Minggu Jam 08.00-16.00 WIB

FREE PAKET HEMAT SERVICE
Untuk semua tipe

Honda Arista
@hondaarista
www.honda-arista.co.id

HONDA ARISTA BENGKULU
JL. ADAM MALIK RT 01 RW 01 PAGAR DEWA KOTA BENGKULU
TELP: 0736-5511888

POLING CABUP DAN CAWABUP BENGKULU UTARA PILIHAN PEMBACA RB



15
Ir. H. Mian Arie Septia Adinata

APBD Terancam Pinalti

ARGA MAKMUR – Sampai saat ini Pemkab dan DPRD BU belum menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Penandatanganan KUA-PPAS harus dilakukan kembali setelah adanya penurunan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hampir Rp 200 miliar.

Sedangkan sesuai PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD harus disahkan paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran berjalan. Ini artinya APBD harus disahkan paling lambat 30 November ini. Jika tidak disahkan sesuai dengan PP tersebut, maka daerah yang lambat membahas APBD akan dikenakan sanksi pinalti dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH mengatakan Pemkab dan DPRD BU sebelumnya sudah melakukan penandatanganan KUA-PPAS. Namun setelah adanya penurunan TKDD dari pemerintah pusat, maka harus dilakukan revisi kembali KUA-PPAS tersebut.

“Karena KUA-PPAS tidak boleh berbeda dengan jumlah TKDD. Sedangkan setelah kita sahkan KUA-PPAS, TKDD baru terbit dan jumlahnya jauh di bawah KUA-PPAS yang sudah kita sahkan,” terangnya.

Saat ini pembahasan anggaran diserahkan kembali ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kembali dibahas dengan Badan Anggaran (Bangar) DPRD. Ia masih optimis APBD akan disahkan sebelum 30 November mendatang. “Memang sesuai aturan kita harus sahkan sebelum 30 November, kita masih optimis bisa kita sahkan sebelum batas waktu sesuai dengan Permendagri dan PP tersebut,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan dengan adanya penurunan TKDD tersebut, artinya harus ada penyesuaian anggaran belanja di seluruh OPD, karena turunya TKDD dibandingkan tahun lalu terkait dengan penanganan Covid-19 nasional. “Tidak hanya terjadi di BU, namun terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini kami yakin masih dalam pembahasan di tingkat TAPD,” beber Sonti. (qia)

GBD dan Honorer Prioritas PPPK

ARGA MAKMUR – Dinas Pendidikan Bengkulu Utara (BU) akan merekrut Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun depan. Hal ini sesuai dengan program sejuta guru yang dilakukan pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan guru secara nasional tahun depan.

Dispendik berencana memprioritaskan atau memberikan nilai tambah bagi

Guru Bantu Daerah (GBD) senior atau guru honorer senior di sekolah-sekolah yang ingin mengikuti PPPK. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan di BU.

“PPPK ini sangat menjanjikan, apalagi gaji yang didapatkan setara dengan PNS golongan IIIa. Jika memang ada peluang persyaratan, kita akan memprioritaskan

bagi guru honorer dan GBD,” kata Sekretaris Dispendik BU, Bambang Pramana Budi, M.Pd.

Dijelaskan, jika bisa menggunakan skala prioritas maka bisa dibuat pola nilai tambahan bagi GBD dan guru non PNS saat pelaksanaan tes. “Sehingga guru yang sudah mengabdikan diri selama ini dengan gaji yang lebih kecil bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik

lagi,” terangnya.

PPPK mendapatkan pendapatan sama seperti PNS. Bedanya mereka tidak mendapatkan kenaikan pangkat dan tidak mendapatkan jaminan pensiun. Selain itu mereka juga bekerja berdasarkan kontrak yang diperpanjang setiap tahun. “Sama seperti GBD dan tenaga non PNS yang selama ini bekerja. Namun PPPK mendapat-

kan gaji yang lebih besar. Tentunya ini sangat membantu masyarakat kita yang selama ini sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan di BU,” jelas Bambang.

Pemkab BU sendiri mengajukan setidaknya 200 PPPK, diantaranya guru. Masing-masing PPPK dipekerjakan sesuai kontrak kerja dengan gaji minimal Rp 2,9 juta per bulan dengan perpanjangan kontrak setiap tahun. (qia)



KERJASAMA: Kapolres BU, AKBP. Anton Setyo Hartanto dan Kepala Dispendik BU, Agus Haryanto usai melakukan penandatanganan MoU maknanya mata pelajaran tentang lalu lintas dalam kurikulum sekolah.

Pelajaran Lalu Lintas Resmi Masuk Sekolah

ARGA MAKMUR – Pelajaran Lalu Lintas resmi akan dipelajari di sekolah-sekolah di Bengkulu Utara terutama tingkat SD dan SMP. Hal ini setelah Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melakukan penandatanganan MoU dengan Dispendik untuk memasukkan pelajaran tentang lalu lintas ke Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Selain teori, dari Polres BU juga akan terjun langsung ke

sekolah untuk melakukan pengajaran lalu lintas. Anton menjelaskan masuknya kurikulum lalu lintas ini agar pelajar tidak hanya mendapatkan pelajaran akademik umum. Namun siswa juga mendapatkan pelajaran tentang tertib berlalu lintas sejak dini.

“Tentunya hal ini terwujud dengan kerjasama Pemkab BU. Untuk itu kami sangat berterima kasih dengan Bupati dan Kadis Pendidikan atas terlaksananya penandatanganan

MoU ini,” jelas Anton.

Dengan mempelajari sejak dini tentang tertib berlalu lintas maka saat nantinya sudah layak menggunakan kendaraan bermotor, siswa tersebut diharapkan akan patuh pada aturan berlalu lintas. Hal ini bisa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. “Kita tumbuhkan kesadaran itu sejak dini. Sehingga akan terus terjadi penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan

lalu lintas,” terang Anton.

Sementara itu, Kepala Dispendik BU, Dr. Agus Haryanto, MM menerangkan pihaknya sangat menyambut baik ide Polres BU untuk memastikan pelajaran lalu lintas dalam kurikulum belajar di BU tersebut. Apalagi saat ini angka kecelakaan didominasi oleh anak-anak usia sekolah. “Maka dari itu masuknya pelajaran lalu lintas ini sangat penting. Sehingga siswa juga belajar

mengenai tata tertib berlalu lintas,” jelasnya.

Dispendik melalui sekolah-sekolah juga sudah mengimbau orangtua siswa untuk tidak membiarkan anak-anaknya mengemudikan sendiri termasuk saat ke sekolah. Hal ini sebagai langkah Dispendik untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. “Kita sudah sosialisasikan agar siswa diantar ke sekolah, bukan membawa kendaraan sendiri,” ujarnya. (qia)

Ditemukan Mayat Terapung di Laut



MENINGGAL: Jasad yang terapung di laut saat ditemukan Tim Basarnas dan Angkatan Laut

KETAHUN – Nelayan asal Pulau Baai Kota Bengkulu menemukan mayat yang mengapung di laut wilayah Desa Pasar Ketahun, BU pukul 08.00 WIB kemarin. Kondisi jenazah sudah membusuk dan mengapung. Saat ditemukan oleh nelayan Kapal Motor (KM) Darmawan, masih menggunakan pakaian lengkap.

Darmawan kemudian menghubungi rekan-nya sesama nelayan Pulau Baai, Andi. Sebab hari Minggu (15/11) lalu, Andi yang berangkat melaut dengan rekannya Pasaribu dihantam ombak dan rekannya Pasaribu hilang tenggelam di perairan Putri Hijau BU.

Mendapat informasi tersebut, Andi lantas melaporkan kejadian tersebut ke Pos Angkatan Laut Pulau Baai bersama Basarnas untuk melakukan penjemputan. Saat dievakuasi dari tengah laut, jenazah sudah membusuk dan bagian wajahnya sudah rusak.

Jenazah langsung dibawa ke RS di Bengkulu untuk dilakukan otopsi dan memas-

tikan identitas jenazah tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BU Burman, SH membenarkan ia sudah menerima informasi tersebut. Penemuan mayat tersebut terjadi di tengah laut yang merupakan wilayah laut Desa Pasar Ketahun. “Dijemput pihak Angkatan Laut dan Basarnas,” ujarnya.

Diketahui, sejak Selasa lalu ada pencarian di laut Sebelat Putri Hijau karena ada nelayan Bengkulu yang kapalnya dihantam ombak hari Minggu lalu di wilayah laut Pasar Sebelat. Namun belum bisa dipastikan apakah jenazah yang ditemukan tersebut adalah nelayan yang sempat hilang tenggelam atau bukan.

“Mengenai identitasnya kita belum mengetahui. Namun memang tidak ada nelayan BU yang hilang dalam kurun waktu dekat ini,” jelas Burman.

Sekadar informasi, hari Minggu pukul 17.00 WIB lalu, KM Bintang Timur yang merupakan kapal nelayan Pulau Baai mencari ikan di wilayah perairan Sebelat Putri Hijau. Saat dalam perjalanan pulang, kapal dihantam ombak hingga salah satu awak kapalnya tercebur dan tenggelam di laut yaitu Pasaribu (45). (qia)

KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada

ARGA MAKMUR – KPU BU akan membuat simulasi pencoblosan di Desa Sawang Lebar Sabtu (21/11). Hal ini untuk menunjukkan pada masyarakat bagaimana tahapan pemilihan atau proses pencoblosan di TPS pada 9 Desember mendatang.

Ketua KPU BU, Suwanto, SH mengatakan dalam simulasi yang akan dilakukan Sabtu mendatang, KPU akan mengajak langsung masyarakat sebagai pemilih. Hal ini untuk mempraktikkan tahapan yang akan dilakukan, mulai dari datang ke TPS hingga selesai.

Berbeda dengan pencoblosan dalam pemilu sebelumnya, pemilih yang datang ke TPS wajib mengikuti protokol kesehatan. Pemilih harus datang dengan menggunakan masker, dan menjaga jarak selama berada di TPS dan menunggu pang-

gilan untuk mencoblos. “Jadi memang semuanya harus dengan protokol kesehatan. Minimal pemilih wajib memakai masker,” terangnya.

Selain itu nantinya tiap pemilih akan diberikan sarung tangan plastik. Sehingga pemilih tidak bersentuhan langsung dengan surat su-

ara atau paku saat melakukan pencoblosan dan dapat menghindari penularan Covid-19. Simulasi juga dilakukan untuk penyelenggara pemilu terutama tingkat TPS. Sehingga penyelenggara di tingkat TPS juga memahami tugasnya masing-masing terutama protokol kesehatan yang harus diterapkan. “Kita berharap dengan adanya aktivitas baru berupa protokol kesehatan saat pencoblosan, semua pihak memahami apa yang harus dilakukan saat menyalurkan hak pilih di TPS,” pungkaskan Suwanto. (qia)

Kasus Covid-19 Kembali Bertambah

ARGA MAKMUR – Kasus Covid-19 di Kecamatan Giri Mulya bertambah satu kasus lagi kemarin (19/11). Sementara total tambahan kasus Covid-19 di BU, kemarin bertambah dua kasus. Satu kasus lagi di Kecamatan Arga Makmur.

Kasus Covid-19 di Giri Mulya merupakan kasus ke-76 yakni laki-laki berumur 36 tahun yang merupakan kontak erat dari kasus sebelumnya. Sedangkan kasus ke-77 adalah warga Kota Arga Makmur yang merupakan perempuan berumur 37 tahun.

Sekretaris Dinas Kesehatan BU, Nova Hendriani, SKM,

MM menerangkan untuk kasus Ke-77 belum ditemukan riwayat kontak erat yang memungkinkan terjadi penularan. Pasien ke-77 mengalami gangguan kesehatan berupa nyeri hulu hati dan kehilangan penciuman.

“Dan hasil swabnya sudah kita dapatkan dan hasilnya positif Covid-19,” terangnya.

Namun keduanya masih dinilai dalam kondisi yang baik dan belum membutuhkan perawatan khusus. Keduanya juga diminta untuk dilakukan isolasi mandiri dan kini dalam pengawasan tim medis. “Mereka saat ini berada di rumahnya

masing-masing dan tidak boleh keluar rumah sebelum dilakukan swab lanjutan hingga hasilnya negatif,” jelas Nova.

Dari total 77 kasus positif Covid-19 tersebut, 39 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan kini sudah beraktifitas seperti biasanya. Ada lima kasus positif yang meninggal dunia dan 31 diantaranya saat ini masih berstatus pasien positif Covid-19. “Dengan terus bertambahnya kasus covid, kita mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terutama dalam beraktifitas di luar rumah,” imbau Nova. (qia)

IKATAN MOTOR
INDONESIA
PROVINSI
BENGKULU

MEMBER OF:

Putrawanjaya, M.M.
Ketua IMI Bengkulu

2
DIRGAHAYU
1968 - 2020
PROVINSI BENGKULU

“TERUS SEMANGAT DAN BANGKIT”

Rakyat Bengkulu PILKADA

JUMAT, 20 NOVEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 8

Masih Perdebatkan Pengusul RUU Pemilu

JAKARTA - Pembahasan RUU Pemilu belum terlihat geregetnya. Alih-alih membahas substansi, DPR lebih sibuk membahas siapa yang akan jadi pengusul RUU tersebut. Apakah badan legislasinya (baleg), komisi II, atau dilempar ke pemerintah.

Kemarin (19/11) baleg menggelar rapat pembahasan kajian RUU Pemilu dengan agenda mendengarkan penjelasan dari tenaga ahli. Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengutip tenaga ahli menyampaikan, RUU itu belum memenuhi asas pembentukan UU. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Firman, jika sudah dibawa ke baleg, seharusnya RUU sudah siap untuk sinkronisasi, pemantapan, pembulatan, dan harmonisasi. Juga

harus sudah dalam bentuk draf final yang disepakati internal komisi pengusul. Namun faktanya, kata dia, RUU tersebut belum final. "Masih ada beberapa pasal yang belum disepakati pengusul, yaitu komisi II," terangnya setelah rapat kemarin.

Politikus Partai Golkar itu mengusulkan tiga opsi. Pertama, RUU Pemilu dikembalikan ke komisi II selaku pengusul. Semua fraksi sudah harus menyetujui pasal-pasal dalam draf RUU sebelum diserahkan ke baleg.

Opsi kedua, kata Firman, RUU tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihaknya dan menjadi usul inisiatif baleg. Sedangkan opsi ketiga, RUU Pemilu diserahkan ke pemerintah. Dengan begitu, pemerintah menjadi inisiator RUU yang akan menentukan pelaksanaan Pemilu 2024 itu. Sampai rapat baleg

berakhir, belum ada keputusan yang diambil. "Mungkin baleg akan rapat lagi nanti untuk ambil keputusan," tambahnya.

Anggota baleg dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mencatat, ada sejumlah pasal yang belum disepakati dalam RUU Pemilu. Di antaranya sistem pemilu, keserentakan pemilu, dan besaran kursi dapil. Selain itu, presidential threshold, parliamentary threshold, dan konversi suara hasil pemilu belum disepakati.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Heri Gunawan mengatakan, draf RUU Pemilu yang dimiliki fraksi-fraksi masih berbeda-beda. Pihaknya tidak sepatutnya jika dilakukan pembahasan di baleg. "Prinsipnya kami meminta draf RUU Pemilu dikembalikan kepada komisi II untuk disempurnakan," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra itu. (lum/c17/byu)

Gakkumdu Akan Minta Klarifikasi

BENGKULU - Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan mengundang para pihak, baik pelapor maupun terlapor dari laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu beberapa hari.

Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah SH, MH menyampaikan laporan yang akan diklarifikasi itu berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh Pemuda Pancasila dan Ahmad Tarmizi Gumay, SH MH.

"Nanti para pihak akan diminta klarifikasi untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," jelasnya.

Ia menjelaskan Gakkumdu berdasarkan hasil koordinasi dengan Gakkumdu, disimpulkan bahwa harus diklarifikasi. Untuk itu para pihak itu akan dipanggil.

Terpisah, Kuasa Hukum Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, Tarmizi Gumay menyampaikan pihaknya akan mengawal tahapan pilkada ini. Rencananya hari ini, pihaknya akan kembali menyanggah kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Guna memastikan berjalannya proses dari laporan indikasi pelanggaran pilkada itu.

"Kami teruskawal, besok (hari ini, red) kami juga akan memantau perkembangan dari laporan lainnya," jelasnya. (war)

Konten Pilkada di Internet Diterbitkan

JAKARTA - Pelanggaran yang ditemukan lembaga pengawas pemilu bukan hanya sebatas tatap muka. Konten internet yang berpotensi disalahgunakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diawasi.

Totalnya, sebanyak 380 konten internet telah diperiksa. Dalam pengawasan konten internet, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Sejak 26 September 2020, Bawaslu menerima laporan pelanggaran internet dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, selain itu, Bawaslu juga membuat kanal 'Laporkan' di situs bawaslu.go.id sejak 10 Oktober 2020, dan pengaduan lewat aplikasi WhatsApp. Data dari Kominfo, hingga 19 November 2020, terdapat 38 jumlah isu hoaks. Sebanyak 217 url dari laporan Kominfo yang telah dianalisis oleh Bawaslu.

Hasilnya, 65 url yang diduga melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, 10 url dinyatakan melanggar Pasal 62 PKPU. "Hasilnya, 77 url yang diduga melanggar. Selain itu, ada sembilan laporan yang masuk di 'Laporkan' situs bawaslu.go.id dengan satu laporan diduga melanggar Pasal 62 PKPU 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada," kata Fritz

lewat keterangan resmi.

Hasil pengawasan Bawaslu hingga 29 Oktober 2020 sebanyak 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui Form A Online. Kajian kerja sama dengan Facebook mendapatkan penulisan iklan kampanye aktif di 'Ad Library' Facebook.

"Rinciannya, 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober, 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan 24 iklan kampanye aktif per 13 November. Total ada 105 iklan kampanye yang aktif diminta Bawaslu untuk take down," tambahnya.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menambahkan, ada alasan iklan kampanye tersebut diturunkan. Yakni karena kampanye di luar jadwal sehingga melanggar Pasal 62 PKPU 13/2020. Dengan begitu, berdasarkan 77 url yang diduga melanggar ditambah 105 iklan kampanye di luar jadwal, maka Bawaslu meminta take down 182 konten internet. Lalu, laporan melalui typeform dari pengawas pemilu. Hasilnya ada 10 laporan masuk, terbagi 5 laporan terkait pelanggaran kampanye, 4 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1 laporan terkait disinformasi.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan koordinasi pengawasan dan penanganan terhadap konten-konten yang terkait Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus ditingkatkan. (fin)

Poling Pasangan
Cagub-Cawagub & Cabup-Cawabup
Pilihan Pembaca RB

Dukung Pasangan Cagub-Cawagub dan pasangan Cabup-Cawabup Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Mukomuko.
periode 2021-2026 pilihan Anda

Pasangan Cagub-Cawagub :

Pasangan Cabup-Cawabup :

IDENTITAS PENGIRIM

Nama :
No HP :
Alamat :

Kirim guntingan formulir ini ke Graha Pena RB Jalan P Natadiri Km 7,5 Kota Bengkulu.
Dilengkapi dengan fotocopy KTP

Pilkada Diklaim Aman

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengaku sejauh ini pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, maupun tahapan lainnya.

Misalnya saja tahapan verifikasi faktual, yang rawan penulisan berjalan lancar. Begitu juga potensi kerumunan lainnya di saat cokolit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan. Persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain," katanya.

Namun, setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Kemendagri bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis," ujarnya.

Langkah sosialisasi dan antisipasi menurut Mendagri sangat penting untuk mengawal Pilkada yang akan aman dari pandemi Covid-19. dilakukannya.

Tito menambahkan, pihaknya juga meminta agar bahan kampanye utama para calon kepala daerah itu adalah alat pelindung diri. Itu mesti menjadi salah satu bahan kampanye utama. Misalnya masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan yang ditaruh di ruang-ruang publik dengan gambar atau logo pasangan calon. (khf/fin)

Tinggal 1 Persen Pemilih Belum Rekam E-KTP

JAKARTA - KPU menyebut jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilkada Serentak 2020 dan belum merekam data e-KTP tinggal 1 persen lagi. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPU Daerah per 11 November 2020, terdapat 1.754.752 pemilih yang belum merekam e-KTP.

"Kemudian dilakukan pemadanan data SIAK Dukcapil pada Rabu 18 November 2020. Dari hasil pemadanan data tersebut ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebesar 1.052.010 pemilih atau 1 persen," ujar Viryan di Jakarta, kemarin (19/11).

Ia memastikan, KPU dan Dukcapil selalu berkoordinasi secara intensif. Bahkan, keduanya merencanakan untuk membentuk tim koordinasi yang secara teknis mengurus DPT hingga hari pemungutan suara.

Sesuai Pasal 57 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk dapat menggunakan hak pilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Sementara, Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih, pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan KTP elektronik. Selama terdaftar, pemilih berhak untuk menggunakan hak pilihnya.

KPU, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menuntaskan rekam KTP elektronik.

KPU melakukan Gerakan dukung rekam KTP elektronik untuk Pilkada serentak 2020 dengan kegiatan sosialisasi, mengirim surat ke setiap pemilih, jemput pemilih sebagai bentuk layanan bagi yang belum melakukan perekaman e-KTP. Melalui kegiatan tersebut, lanjutnya, diharapkan semua warga yang memenuhi syarat sebagai

pemilih dapat melakukan perekaman KTP elektronik.

Viryan juga menyatakan daftar pemilih untuk Pilkada 2020 disusun dengan transparan, terbuka, dan partisipatif, sehingga menghasilkan DPT yang bersih.

Selain proses cokolit (pencocokan dan penelitian) dan rekapitulasi berjenjang, juga dilakukan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) di seluruh daerah dan audit internal.

Untuk Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini, kata dia, KPU telah melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dibantu PPD sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016.

Proses pemutakhiran dilakukan dengan menambah atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. KPU kabupaten kota dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah bekerja dengan baik dan tidak ada yang terpapar Covid-19. (riz/fin)

LOMBA FOTOGRAFI

HUT PROVINSI BENGKULU

KATEGORI UMUM, TEMA : GELIAT PEMBANGUNAN DAN WISATA 52 TAHUN PROVINSI BENGKULU

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Foto hasil karya peserta dan belum pernah dilombakan pada event lain.
2. Foto diambil sepanjang Januari-November 2020
3. Objek foto adalah hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu baik di Kota Bengkulu, maupun di kabupaten. Termasuk geliat spot wisata yang menjadi program Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Tidak diperkenankan menggunakan drone
5. Wajib follow akun media sosial instagram, facebook dan subscribe Youtube official Rakyat Bengkulu dan Media Center Provinsi Bengkulu
6. Upload foto di Feed Instagram (IG) kamu, tag dan mention @rakyat_bengkulu_online dan @mediacenterbkl serta gunakan hashtag #lomfafotohutprovinsike52 #rakyatbengkulupilihantama
7. Akun tidak boleh digembok selama kompetisi berlangsung (set for public)
8. Jangan lupa registrasi gratis di bit.ly/LOMBAFOTOHUTBENGKULU
9. Panitia hanya akan memproses hasil karya peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan diatas.
10. Periode upload 6-24 November 2020
11. Pengumuman pemenang 28 November 2020
12. Keputusan pemenang oleh juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

JUARA 1 Rp 5.000.000
JUARA 2 Rp 3.000.000
JUARA 3 Rp 2.000.000

Plt. Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, SE
Sekda Provinsi Drs. Hamka Sabri, M. Si

KATEGORI

1. AKTIVITAS SERU BERSAMA KELUARGA
2. GELIAT PEMBANGUNAN 52 TAHUN PROVINSI BENGKULU
3. UCAPAN HUT KE-52 PROVINSI BENGKULU

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Buat video Tik Tok dengan tema yang telah ditentukan (pilih salah satu tema)
2. Wajib follow akun media sosial instagram, facebook dan subscribe Youtube official Rakyat Bengkulu dan Media Center Provinsi Bengkulu
3. Upload video di Feed Instagram (IG) kamu, tag dan mention @rakyat_bengkulu_online dan @mediacenterbkl serta gunakan hashtag #tiktokchallenge #hutprovinsibengkulu #rakyatbengkulu
4. Cantumkan kategori pada caption postingan.
5. Akun tidak boleh digembok selama kompetisi berlangsung (set for public)
6. Keputusan pemenang oleh juri tidak dapat diganggu gugat
7. Kompetisi ditutup 24 November 2020
8. Pengumuman pemenang 28 November 2020
9. Hadiah Total Rp 15.000.000

JUARA 1 Rp 2.000.000 per kategori
JUARA 2 Rp 1.500.000 per kategori
JUARA 3 Rp 1.000.000 per kategori

JUARA FAVORIT (Like Terbanyak) Rp 500.000

Plt. Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, SE
Sekda Provinsi Drs. Hamka Sabri, M. Si

PENGADAAN

Plano Jamban Pabrik UPVC, Papan Gypsum, Papan PVC, Baja Ringan

JOIN US NOW !!

TURKISH AIRLINES

Turkey Explore 100%

Rp. 13.800.000

Depotkan Dik Khusus: Dan Souvenir Cantik! Untuk Yang DP 5'10" 17 Agustus 2020 !!!

GRAND MASJID - GREAT MOSQUE & TOWER - ISL

MARSA - ELPHESANCHMENT CITY - TURKEY

SEASIDE BUTLER COSTONCASTLE - BANGKALU

RESTORAN - TORONTO UNDERGROUND CITY - BANGKALU

POTERY WALKER - SULTAN - ARIN MAUSOLEUM

CARIBBEAN - BOSPHORUS BRIDGE - GRAND

BAZAR - HADIA SOPHIA - TOKRAB ANAZ

12-21 Oct 2020
09-18 Nov 2020
23 Nov - 02 Des 2020

1K57 CGK IST 2100 - 0500
TK56 IST CGK 0220 - 1800

Contact Person :
0812 9296 976 (Rose), 0813 7783 8875 (Yenny)

YAMAHA

ALL NEW **NMAX 155**

CONNECTED / ABS

LIVE THE PRIDE

MAKIN CANGGIH DENGAN **Y-CONNECT**

*Motor Terkoneksi Ke Smartphone
*Khusus untuk ALL New Nmax Tipe ABS

Thamrin

BIKE OF THE YEAR 2020

BEST OF MEDIUM SKUTIK 150 CC

- Otomotif Award 2020 -

Smart Key System *Khusus Tipe ABS
Traction Control System *Khusus Tipe ABS
Stop & Start System
Electric Power Socket
Lampu Depan & Belakang LED Baru & Lampu Hazard

Segara Download di App Store

SUZUKI DP Mulai **20Jtan***
ALL NEW ERTIGA DP Mulai **20Jtan***
GEMERLAP SUZUKI **NEW IGNIS** DP Mulai **15Jtan***
NEW CARRY DP Mulai **15Jtan*** YOUR GEAR

Gratis Oli - Sparepart s.d 50.000km*

PT. KANGAROO MOTOR MANDIRI
Head Office : Jl. Mayjend Sutuyo No. 88 Kota Bengkulu. Telp. : (0736) 28888/ 085 2222 11 767
Outlet Pematang : Jl. Lintas Bengkulu Padang Di Sidodadi Pematang. Telp. 0852-4835-8868
Outlet Curup : Jl. Durian Dupun (Simpang Merigi) Kab. Kepahiang. Telp. 0821-7595-8529
Outlet Manna : Jl. Ahmad Yani Kac. Ibu Kota Manna. Telp. 0821-2314-6543
Jam Kerja Bengkulu : Senin - Jum'at : 08.30wib - 16.30 WIB
Sabtu : 08.30wib - 12.30 WIB
Hotline Service : 0821-7573-6233

Kebut Pembahasan RPP Perizinan

CV. CENTRAL ELEKTRO

JALAN SALAK RAYA NO. 99 LINGKAR TIMUR, KOTA BENGKULU

0736 7324 996 central_elektro.bkl
0811 7360 422 centralelektobengkulu.com

- PENGADAAN AC
- PENJUALAN AC
- SERVICE AC
- SPARE PART AC
- RENTAL AC DAN KIPAS EMBUN
- CCTV & SECURITY SYSTEM

HIKVISION
DAIKIN



RAKOR: Sebagai antisipasi ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Bengkulu di gelar rakor, Kamis (19/11) di Ruang Rafflesia Kantor Gubernur.

Bentuk Kluster Penanggulangan Bencana

BENGKULU - Pemrov Bengkulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu bakal membentuk kluster penanggulan-

gan bencana. Sebagai antisipasi dari ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu Rusdi Bakar, mengatakan wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan musim hujan sebanyak 73%.

Baca **BENTUK..** Hal 15

BENGKULU - Asisten III Setdaprov Bengkulu Gotri Suyanto, mengatakan Pemprov Bengkulu akan segera melakukan pembahasan khusus terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

"Ini sudah sosialisasi yang ke dua, dan ini sudah teknisnya. Sudah disampaikan per pasal untuk minta masukan dari provinsi maupun kabupaten/kota," kata Gotri.

Baca **KEBUT..** Hal 15



GOTRI SUYANTO

Penyiram Air Keras, Dituntut 7 Tahun

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Bengkulu, Andi Pebrianda, SH, MH menuntut terdakwa penyiraman air keras, Nina dengan pidana penjara selama 7 tahun. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan di PN Bengkulu, kemarin (19/11) sore, yang dipimpin hakim Arifin Sani, SH, MH.

Dalam tuntutan JPU menyatakan terdakwa Nina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 345 ayat 1 KUHP. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Adi Suprpto mengalami luka bakar yang berat dan selama perawatan, pekerjaan Adi Suprpto terganggu karena satu bulan tidak masuk kantor.

Selain itu, perbuatan terdakwa membuat korban merasa malu dengan luka yang ada di bagian muka dan bagian tubuh lainnya.

Baca **PENYIRAM..** Hal 15

AYO BAYAR PBB TEPAT WAKTU

Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH.

BADAN KEUANGAN DAERAH BENGKULU TENGAH

GUNAKAN HAK PILIH ANDA 9 DESEMBER 2020

DATANGI TPS DAN PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

MEMILIH PASLON ATAU KOLOM KOSONG SAH DILINDUNGI KONSTITUSI

PILIHAN ANDA MENENTUKAN MASA DEPAN DAERAH

Pesan ini disampaikan oleh :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU Kabupaten Bengkulu Utara

ASTRA MOTOR member of ASTRA

PERIODE 1-30 Nov 2020

NARRUTO NOVEMBER ANGSURAN RAH UNTUNG TOTAL

POT ANGSURAN Rp. 100 Ribu Perbulan

POT ANGSURAN Rp. 100 Ribu Perbulan

POT ANGSURAN Rp. 100 Ribu Perbulan

POT ANGSURAN Rp. 25 Ribu Perbulan

GRATIS 1X

hondabengkulu

HONDA One HEART

MENGALAMI KENDALA DI JALAN? ATAU MAU SERVICE DI RUMAH?

HUBUNGI LAYANAN care 0819 2500 989 ATAU 1 500 989

LEBIH MUDAH LEWAT BOOKING SERVICE DI APLIKASI : **MOTORKU**

DOWNLOAD DI PLAYSTORE REFERRAL CODE : **HNBKBL**

HALO DUKCAPIL 1500537

Layanan Call Center Ditjen Dukcapil Kemendagri

PELAYANAN ADMINDUK SECARA ONLINE KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

KAB. BENGKULU SELATAN http://dukcapilbengkuliselatan.online 081307233170; 082182614545; 082377992011	KAB. REJANG LEBONG Dukcapil Rejang Lebong 085282516038 (KK, KTP, NIK) 08117380174 (Semua Jenis Akta)	KAB. BENGKULU UTARA http://bit.ly/Permohonan_Cetak_KTP http://bit.ly/Permohonan_Cetak_Akta_Kelahiran_Admin_1
KAB. KAUAR 081271421573, 082175426462, 082375069700	KAB. MUKOMUKO Ditdukcapil Mukomuko KUWAWU PADEK (085273199139)	KAB. LEBONG 085268012226 Layanan Dukcapil Lebong http://www.dukcapillebongkab.go.id
KAB. SELUMA 085279872364 Dukcapil Seluma pelayanan.dukcapilseluma@gmail.com	KAB. BENGKULU TENGAH 085357599085; 081279535342 (Dafduk) 085273111146; 081271992052 (Capil)	KOTA BENGKULU Aplikasi SLAWE Download di App Store

Jl. Pembangunan No. 7 Padang Harapan Kota Bengkulu (0736)7326471 Fax (0736)7326083
capil.provbk@gmail.com Dukcapil.bengkuluprov.go.id 08117311717
Dukcapilprov Bkl @dukcapilprovbkl @CapilProvBKL

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

AYO MULAI DARI DIRI SENDIRI JAGA LEBONG DARI PENYEBARAN COVID-19

Dengan Selalu Memakai Masker Saat Keluar Rumah, Menjauhi Kerumunan, Rajin Mencuci Tangan dan Terapkan Pola Hidup Sehat Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Lebong Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Pjs. Bupati Lebong
H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, MM

Sekda Lebong
H. Mustarani Abidin, SH, M.Si

POLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG

PILIHAN PEMBACA RB

TEGUH & NASIRWAN

4

Teguh 41 Nasirwan

1

Dalhadi Umar 39 Wawan Fernandez

3

Kopli 35 Rozi

2

Armansyah 32 Masropen



BANDEL: Imbauan pemakaian masker sampai saat ini belum sepenuhnya dipatuhi, bahkan di pusat keramaian sekalipun.

Diancam Denda, Warga Tagih Pengadaan Masker

LEBONG UTARA - Sampai saat ini perintah kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, belum sesuai dengan langkah yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Sejauh ini Pemkab Lebong melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) baru membagikan 10 ribu masker ke masyarakat. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan sebagaimana jumlah warga dewasa yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lebong yang mencapai 70 ribu lebih.

"Itu baru jumlah warga dewasa sebagaimana DPT (daftar pemilih tetap, red) yang dikeluarkan KPU. Sementara kewajiban memakai masker juga berlaku untuk anak-anak. Artinya masker yang dibagikan ke masyarakat sangat minim," ujar Muhidin (50), warga Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara.

Pentingnya pembagian masker ditambah, menurut Muhidin berkaitan dengan status ekonomi masyarakat yang berbeda. Bagi sebagian orang uang untuk beli masker jauh lebih penting dibelikan beras untuk kebutuhan perut. Sementara pembatasan aktivitas membuat sejumlah geliat ekonomi mati suri.

"Fakta ini jangan dikesampingkan. Banyak ekonomi masyarakat yang terpuruk pascapandemi Covid-19 sehingga sebagian orang harus kehilangan mata pencarian. Contohnya orang yang cari makan dari bisnis organ tunggal, bagaimana bisa makan kalau pesta dilarang," ungkap Muhidin.

Sementara Kepala Dinkes Kabupaten Lebong, Rachman, SKM, M.Si belum bisa dikonfirmasi. Namun pernah disampaikan, pengadaan masker hanya dianggarkan Rp 50 juta. Dana itu hanya cukup untuk membeli 10 ribu masker. Itupun hanya masker kain yang tingkat keamanannya sangat rendah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. (sca)

MTQ Kabupaten Sepi Peminat

PELABAI - Pandemi Covid-19 juga berdampak pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Lebong. Hingga kemarin (19/11), baru 7 kecamatan yang telah menyerahkan nama perwakilan guna mengikuti perlombaan ke Bagian Kesejahteraan Sosial (Kessos) Sekretariat Kabupaten Lebong. Sementara pelaksanaan MTQ dijadwal 1 Desember.

Dikatakan Kabag Kessos Sekretariat Kabupaten Lebong, Fabil Rozak, S.Ag, M.Pd.I, lima kecamatan yang telah mendaftarkan pesertanya itu Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Amen. Termasuk Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Tengah. "Kepada lima kecamatan lainnya, kami harap segera menyerahkan nama peserta yang diwakilkan agar lomba MTQ berjalan meriah," kata Fabil.

Kelima kecamatan yang belum menyerahkan nama pesertanya, versi Fabil, sama sekali belum ada koordinasi ke Bagian Kessos. Dipastikan dalam minggu ini Kessos akan menyurati kelima pemerintah kecamatan itu untuk memastikan kendala yang dihadapi. Jika permasalahannya tidak ada warga di kecamatannya yang layak didaftarkan, pihak kecamatan bersangkutan bisa mengimpor peserta dari kecamatan lain. "Dengan catatan peserta yang didaftarkan belum terdaftar mewakili kecamatan lain," tukas Fabil.

Perwakilan yang diutus mengikuti MTQ tingkat Kabupaten Lebong tidak boleh berasal dari kabupaten atau kota lain. Jika kedatangan adanya peserta dari kabupaten atau kota lain, pihak panitia akan melakukan diskualifikasi. Begitu juga peserta yang mewakili lebih dari satu kecamatan, akan diwajibkan memilih satu kecamatan saja. "Mudah-mudahan seluruh kecamatan mendaftarkan pesertanya," jelas Fabil.

Diketahui, dari 8 cabang yang akan dilombakan, baru 4 cabang yang terdapat memiliki peserta. Semua perwakilan sementara yang diutus untuk 7 kecamatan mendaftarkan cabang tilawah, cabang fahmil, cabang sarhil dan cabang khat. Sedangkan untuk cabang hifdzil, cabang tafsir, cabang hafiz hadis, cabang qira'at sab'ah dan Musabaqah Makalah Al-Qur'an (MMQ) belum ada peserta. (sca)

Satu Paslon Tak Mau Kampanye Elektronik

Cuma Mau di Koran

PELABAI - Satu dari 4 pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong tidak akan memanfaatkan fasilitas kampanye di media massa elektronik. Yaitu paslon Armansyah Mursalin-Masropen Irihadi. Itu sesuai klarifikasinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong.

Dikatakan Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Lebong, Effan Lavendes, A.Md, dalam

waktu dekat pihaknya akan meminta Armansyah-Masropen membuat pernyataan tertulis terkait sikapnya yang tidak akan kampanye di media elektronik. "Soalnya pernyataan itu baru disampaikan secara lisan ke kami," kata Effan.

Armansyah-Masropen hanya akan kampanye di media massa cetak. Itu sesuai draf materi kampanye yang telah disampaikan ke KPU Lebong. Sedangkan 3 paslon lainnya, Dalhadi Umar-Wawan Fernandez, Kopli Ansori-Fahrurrozi dan Teguh Raharjo-Nasirwan tetap

akan memanfaatkan kampanye di media massa cetak maupun elektronik. "Keempat paslon sudah menyerahkan materi kampanye untuk media massa cetak ke kami," terang Effan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada 2020, dijelaskan masa kampanye di media massa adalah 14 hari. Terhitung 22 November hingga 5 Desember. Materi yang harus ditampilkan meliputi foto dan nomor urut paslon, visi dan misi serta logo partai pengusung. (sca)

Jangan Hanya Slogan, Pastikan Tak Ada MP

LEBONG UTARA

Pernyataan sikap Badan Pegawai Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong akan menindak tegas praktik money politics (MP) atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember, didukung masyarakat. Namun Bawaslu diminta benar-benar bergerak turun ke lapangan. "Harus ada aksi nyata, jangan hanya slogan," kata Ketua Anshor Kabupaten Lebong, Eko Hatmono.

Salah satu aksi nyata itu, lanjut Eko, dimulai dengan sosialisasi. Bentuknya tidak hanya ke masyarakat. Namun juga kepada para peserta Pilkada. Termasuk partai politik (parpol) pengusung. "Surat para peserta yang isinya mengimbau agar peserta jangan coba-coba melakukan MP dan kalau bisa minta mereka buat pernyataan sikap tertulis," terang Eko.

Ia meminta Bawaslu serius memerangi MP karena belajar dari pengalaman Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten selama ini. Uang masih menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi selera pilih mayoritas masyarakat. Ia menilai tidak maksimal jika Bawaslu hanya melakukan penekanan anti MP ke masyarakat. "Masyarakat itu selaku penerima, kalau tidak ada yang memberi tentu saja tidak akan terjadi praktik MP,"



JEFFRIYANTO

papar Eko.

Senada disampaikan Herianto, tokoh masyarakat Lebong yang mengaku kurang yakin dengan kesanggupan Bawaslu menekan praktik MP dalam Pilkada 9 Desember. Soalnya sejauh ini belum terlihat langkah nyata Bawaslu terkait komitmennya itu. "Kalau hanya menyampaikan sikap, semua orang juga bisa. Yang diperlukan itu aksi, bukan hanya ucapan saja," paparnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jeffriyanto, SP, M.Pd memastikan pihaknya sudah membentuk percontohan masyarakat anti MP. Yaitu di Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis. Namun diakuinya tidak akan maksimal kinerja Bawaslu jika tidak ada dukungan dari semua elemen dalam memerangi MP. "Baik penyelenggaranya, pesertanya maupun masyarakat harus menanamkan sikap MP adalah musuh dalam penegakan demokrasi," jelasnya. (sca)

Delapan PNS Ajukan Pindah

PELABAI - Kendati sudah mengantisipasi kekurangan PNS dengan larangan pindah bagi PNS yang belum mengabdikan 10 tahun, tetap saja ada yang mengajukan pindah. Tahun ini tercatat 8 PNS Pemkab Lebong mengajukan pindah. Bahkan 4 diantaranya belum mengabdikan 10 tahun di Kabupaten Lebong.

Tidak hanya pindah ke luar kabupaten, 2 PNS terdapat mengajukan pindah ke luar Provinsi Bengkulu. Sedangkan 6 PNS lainnya, 4 mengajukan pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dan 2 PNS mengajukan pindah

tugas ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. "Pengajuan pindah masih diproses di kepegawaian," kata Kabid Mutasi Pengadaan Pegawai dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Apedo Irman Bangsawan, SH.

PNS yang mengajukan pindah rata-rata beralasan ingin ikut suami. Walaupun usulan pindahnya sudah mendapat rekomendasi bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), belum tentu pengajuan pindahnya diterima. Tetap harus melalui kajian bidang kepegawa-

ian mengingat Pemkab Lebong saat ini masih sangat kekurangan PNS. "Jumlah PNS Lebong saat ini hanya dua ribu enam ratusan dari kebutuhan ideal lima ribuan orang," terang Apedo.

Di luar 8 PNS yang mengajukan pindah, tahun ini terdapat 34 PNS memasuki masa pensiun. Rata-rata PNS berstatus tenaga guru. Sementara untuk PNS dari luar yang mengajukan masuk ke Lebong, hingga saat ini terdapat hanya 1 orang. "Semua pengajuan pindah tugas, baik keluar maupun masuk Lebong itu masih diproses di BKN (Badan Kepegawaian Negara, red)," tukas Apedo. (sca)

KORPRI IDAMAN ESTATE

Rumah Type 36 Subsidi

Lokasi: Jl. Korpri IV RT 08 RW 05 - BENTIRING

PROMO BULAN INI 5 JUTA TERIMA KUNCI SKB

ANGSURAN MULAI Rp. 877.741

DIDUKUNG KPR Bank **BTN**

Segera Hubungi...!! 0852 6791 1112

0853 8431 2727 0821 8265 4441

PT. IDAMAN GRAHA MANDIRI

Yayasan/LPK Mirai Nusantara Cabang Bengkulu

Izin Kemenakertrans RI, Keputusan DIRJEN BINA LATTAS NOMOR KEP. 54/LATTAS/II/2018

Alamat : Gang Pari IV RT 03 RW 02 No 125 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Menerima Siswa/Program Magang ke Jepang

Dengan Syarat :

- Fotocopy KTP
- Fotocopy KK
- Fotocopy Akte Lahir
- Ijazah SMA / SMK/MA/Sederajat (Legalisir)
- Pas photo warna 4x6 enam lembar
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Izin Orang Tua/Wali
- Membayar Biaya Pendidikan

Informasi lebih lanjut hubungi :

- 081373802011 (Anggina)
- 082289661989 (Madyon Saputra)
- 082289334283 (Asep Supriyatna)
- 085268244054 (Nafidz)
- 082284289736 (Hasmartito)

LPK Mirai Nusantara Cabang Bengkulu merupakan satu-satunya LPK di Bengkulu yang berstatus SO (Sender Organizer) Lembaga Penyelenggara Pendidikan sekaligus Pemberangkatan Magang Ke Jepang. Kantor Pusat di Jl Raya Cikuda No 332 Jatiningor Kabupaten Sumedang Jawa Barat berdiri sejak tahun 2001.

PERUMAHAN CLUSTER TENGAH PADANG RESIDENCE

Lokasi: Jl. Iskandar, 50m dari Masjid Jamik Depan SMPN 3

PERUMAHAN BATANG HARI PERMAI II

Lokasi: Jl. Batang Hari Kel. Nusa Indah

PERUMAHAN MINIMALIS AHSANI RESIDENCE

Lokasi: Jl. Dempo 4 Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Miliki Segera Perumahan Subsidi :

- BENTIRING PERMAI III** Lokasi: Jl. Darma Wanita Kel. Bentiring
- PEMATANG PERMAI** Lokasi: Jl. Perintis Kel. Pematang Gubernur
- SURABAYA PERMAI V** Lokasi: Jl. Nakau - Air Sebakul Kel. Surabaya

KPR Bisa Melalui **Bank BTN**

Hubungi: **PT. AHSANI KARYA**

Jl. Fatmawati No. 16 A Penurunan (Depan SD 2) Kota Bengkulu

Telp. 0736-24996, HP. 085279648787, 082175712286, 082371305405

50 Ekor Sapi Mati, Kerugian Ratusan Juta

MUKOMUKO - Kerugian ratusan juta dialami warga pemilik ternak sapi di Kabupaten Mukomuko. Penyebabnya serangan penyakit jembrana. Data dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Mukomuko, ada 70 ekor sapi yang terpantau positif terkena penyakit jembrana. Dari jumlah itu, 50 ekor sapi mati. Jika per ekor saja dikalikan sekitar Rp 12 juta, berarti kerugian warga Mukomuko mencapai Rp 600 juta. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Mukomuko, Warsi-

man tidak menampik kasus jembrana di Kabupaten Mukomuko terbilang lumayan banyak. Dari awal tahun hingga sekarang, tercatat ada 70 ekor lebih sapi yang terkena penyakit tersebut. "Dari 70 kasus, terdapat 50 ekor sapi mati. Selebihnya itu berhasil sembuh," kata Warsiman.

Menurutnya, untuk kasus Jembrana terbanyak ada di wilayah Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya dan Penarik. Sedangkan di wilayah Kecamatan XIV Koto yang sebelumnya pada tahun lalu

paling banyak sapi yang terkena penyakit jembrana, sampai saat ini belum ditemukan satu pun kasus penyakit jembrana.

"Penyakit jembrana ini belum sampai menyebar ke semua kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Baru di beberapa kecamatan saja. Ada kemajuan positif dalam penanganan penyakit jembrana. Seperti di wilayah yang sebelumnya pada tahun 2019 paling banyak kasus jembrana, untuk tahun ini malah belum ada kasus satupun," jelas Warsiman.

Ditambah Warsiman, untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus jembrana di Mukomuko agar tidak semakin banyak, pihaknya sampai kemarin, masih rutin melakukan vaksinasi ke ternak jenis sapi. "Upaya pencegahan masih terus kita lakukan. Dari vaksinasi diharapkan bisa memberi kekebalan tubuh pada sapi. Agar antibodinya bisa melawan ketika penyakit ini datang," ujar Warsiman.

Sampai kemarin, disebut Warsiman, pihaknya sudah memvaksin sekitar 1.700

ekor sapi. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat agar jangan tergiur membeli sapi dengan harga yang murah, terutama dari luar daerah. Karena bisa jadi ada indikasi terkena penyakit jembrana. "Jangan tergiur membeli sapi dengan harga murah. Ditakutkan ada indikasi sapi tersebut sakit. Selain itu, peternak kita sarankan dapat melibatkan petugas kesehatan hewan. Ini untuk dilakukan pengecekan kesehatan sebagai antisipasi penularan penyakit jembrana," imbau Warsiman. (huc)

POLING
CABUP DAN CAWABUP
MUKOMUKO
PILIHAN PEMBACA

59

2

SAPUAN **WASRI**

50

1

CHOIRUL HUDA **RAHMADI**

Lintas

Sulit Besarkan Baby Lobster

MUKOMUKO - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, membuka peluang bagi nelayan se Indonesia tak terkecuali nelayan Mukomuko untuk menangkap dan menjual benih lobster atau yang dikenal dengan baby lobster. Tidak hanya penangkapan dan penjualan, peluang pembesaran dan ekspor lobster juga terbuka bagi yang memiliki modal. Akan tetapi, untuk pembesaran baby lobster ini butuh karakteristik laut khusus.

Sayangnya, untuk karakter laut Mukomuko tidak cocok untuk lokasi pembesaran baby lobster. Sebab, daratan pesisir Mukomuko yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia membuat perairan laut Mukomuko bergelombang tinggi secara terus menerus. "Laut Mukomuko tidak cocok untuk pembesaran baby lobster. Ombak laut kita besar," kata Kepala Dinas Perikanan Mukomuko, Eddy Aprianto, SP, M.Si.

Meski demikian, tambah Eddy, nelayan tetap punya peluang dalam usaha baru ini.

Nelayan Mukomuko masih bisa melakukan aktivitas penangangan benih lobster dan menjualnya kepada penampung. Satu perusahaan eksportir lobster asal Kabupaten Kaur yang memiliki lokasi pembesaran baby lobster siap menampung benih lobster hasil tangkapan nelayan. "PT. Dua Putra Pertama di Kaur siap menampung benih lobster kita. Kalau laut Kaur yang tenang cocok untuk pembesaran baby lobster. Baru satu perusahaan ini yang berkoordinasi dengan kita," jelasnya.

Sementara itu, bagi nelayan Mukomuko yang ingin melakukan penangkapan dan penjualan benih lobster, ada ketentuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya yaitu terdaftar sebagai nelayan lobster di kementerian tersebut. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah membuka pendaftaran calon nelayan penangkap baby lobster. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi e-lobster. Aplikasi ini dapat didownload di playstore. Proses pendaftaran tinggal mengikuti petunjuk aplikasi saat pendaftaran.

"Sementara ini kita upayakan pendaftaran manual. Nelayan sudah kita kumpulkan. Ada 306 orang nelayan yang mendaftar, berkasnya sudah kita kirim ke kementerian. Terbaru, ternyata pendaftaran harus lewat aplikasi e-lobster. Untuk membantu nelayan, kita minta tolong dengan para penyuluh. 306 orang nelayan kami minta mendaftar lagi via online. Bagi nelayan lain yang mau juga bisa mendaftar secara langsung melalui aplikasi e-lobster. Tidak ada wewenang dinas pada pendaftaran ini. Silakan langsung melalui aplikasi, kementerian langsung yang menentukan," terang Eddy. (huc)



COORDINASI: Plt Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP saat berkoordinasi dengan BWSS VII Bengkulu.

Butuh Anggaran Rp 500 M

Plt Bupati Temui BWSS

MUKOMUKO - Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu diharapkan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 500 miliar untuk Kabupaten Mukomuko. Sebab ada sejumlah kegiatan yang gagal terealisasi tahun 2020. Selain itu, tahun sebelumnya, alokasi anggaran untuk kegiatan di Mukomuko dari BWSS mencapai Rp 300 miliar lebih.

Pemintaan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP saat mendatangi BWSS VII Provinsi Bengkulu. Ia melihat cukup banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani BWSS di Mukomuko. "Hampir 70 persen anggaran BWSS itu ke Mukomuko. Makanya kita minta, kalau bisa tahun 2021 bisa sampai Rp 500

miliar. Tahun sebelumnya lebih dari Rp 300 miliar. Banyak hal yang mendesak dan harus diatasi di Mukomuko," kata Haidir didampingi Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mukomuko, Bustari, ST, MM.

Setidaknya ada tujuh item yang perlu segera ditangani BWSS. Antara lain, pembangunan pengamanan Sungai Muar dari erosi khususnya di wilayah Kecamatan Ipuh, penanganan pendangkalan muara Air Hitam di Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh. Akibat dari pendangkalan itu membuat 200-300 hektare areal persawahan di wilayah tersebut terendam banjir.

Selain itu, penanganan erosi Sungai Selagan di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam, penanganan erosi yang nyaris menghabiskan

puing-puing bangunan Benteng Anna, penanganan infrastruktur irigasi di Daerah Irigasi Manjuto, penanganan banjir Sungai Air Buluh, pembangunan muara Sungai Muar di Ipuh sebagai akses keluar masih kapal nelayan, penanganan abrasi pantai di Kabupaten Mukomuko dan dukungan pembangunan bendungan serta embung di Mukomuko untuk ketahanan pangan nasional.

Untuk sejumlah kegiatan tersebut akan dilakukan penyusunan dokumen Survei Investigasi Desain (SID). Seperti erosi Sungai Muar yang mengancam rumah penduduk dan pedangkalan muara Air Hitam. "Erosi Sungai Muar di Ipuh sangat mendesak sekali. Mereka (BWSS) akan melakukan SID terlebih dulu. Sedangkan penanganan banjir Sungai Air Buluh, sudah ada SID.

Tinggal pemaparan di kementerian apa saja yang harus dilakukan," sebut Haidir.

Haidir memastikan, Pemkab Mukomuko mendukung sepenuhnya, semua kegiatan BWSS VII Provinsi Bengkulu di Kabupaten Mukomuko. Apapun yang dibutuhkan, menurut Haidir, pihaknya siap membantu. Termasuk jika harus mendampingi pihak BWSS mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kita minta kepada pihak balai, apapun yang dibutuhkan akan didukung asal untuk membangun Kabupaten Mukomuko. Ini mengingat banyak persoalan yang harus ditangani BWSS di Mukomuko. Kalau memang perlu didampingi, kita siap damping. Butuh surat-surat dukungan, kita siapkan," papar Haidir. (huc)

Kakan Kesbangpol Sampaikan Klarifikasi BLT DD Masih Tunggu Petunjuk

MUKOMUKO - Kepala Kantor (Kakan) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mukomuko, Iskameri, S.Pd, M.Si melakukan perlawanan karena dirinya dinyatakan melakukan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Mukomuko sudah melayangkan surat rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Terkait hal itu, Iskameri menyampaikan surat klarifikasi ke Bawaslu Mukomuko, kemarin (19/11). Ia meminta Bawaslu meninjau ulang keputusan yang sudah dibuat mengenai dirinya. "Demi menjunjung tinggi hukum sebagai panglima, serta demi menegakkan keadilan pemilu, saya menyatakan sangat keberatan atas apa yang diputuskan Bawaslu Mukomuko," kata Iskameri.

Oleh sebab itu, surat yang tertuju ke Bawaslu Mukomuko itu turut ditambatkan ke sejumlah pihak. Diantaranya ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua Bawaslu RI, Ketua KASN, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Plt Bupati Mukomuko dan Sekda Mukomuko. "Tembusan kita sampaikan ke Plt Bupati dan Sekda. Untuk yang di pusat juga kita tembuskan," jelas Iskameri. Sebelumnya, Iskameri dil-



KLARIFIKASI: Kakan Kesbangpol Mukomuko, Iskameri menyampaikan surat klarifikasi ke Bawaslu Mukomuko, Kamis (19/11).

aporkan ke Bawaslu Mukomuko atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Pelaporinya adalah Ahmad Sayuti warga Penarik. Laporan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu sampai berujung rekomendasi ke KASN. "Hal ini saya lakukan tidak lain untuk menuntut keadilan. Saya keberatan, makanya saya juga layangkan dalam bentuk surat ke Bawaslu Mukomuko," tegas Iskameri.

Dari lembar surat yang RB peroleh, Iskameri menjelaskan kronologis unggahan di akun Instagramnya yang berujung dilaporkan ke Bawaslu Mukomuko. Unggahan itu yang menjadi alat bukti dugaan pelang-

garan netralitas ASN. Meski ia tidak menampik kalau akun Instagram tersebut miliknya. Namun yang mengunggah foto yang dipermasalahkan, diklaim Iskameri bukan dilakukannya, melainkan tidak sengaja oleh salah seorang anaknya.

"Memohon kepada Bawaslu Mukomuko untuk dapat menunjukkan unsur-unsur atau dasar hukum yang termaktub Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Agar terang benderang, mengingat dugaan pelanggaran netralitas ASN itu mendudukkan saya sebagai terlapor," tandas Iskameri. (huc)

BLT DD Masih Tunggu Petunjuk

MUKOMUKO - Pengalokasian anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (DD) untuk tahun depan, belum dapat dipastikan. Disebutkan Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mukomuko, M. Fadly, S.STP, M.Si, untuk kepastiannya masih menunggu petunjuk dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Ketentuannya belum ada sampai dengan kita. Sampai sekarang kita masih menunggu," kata Fadly.

Lanjut Fadly, kebijakan demikian akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan menteri desa (Permendes). Pastinya, sekarang setiap desa, harus ada mengalokasikan dana yang sifatnya untuk penanggulangan bencana.

Kalau BLT DD belum ada petunjuk," ujar Fadly.

Setiap desa wajib menyediakan berapa pun keterseediaannya sesuai hasil musyawarah desa (musdes). Mengenai wajib menyediakan berapapun agar ketika terjadi bencana di desa tersebut tidak harus menunggu atau melakukan perubahan angga-

ran. Namun pemerintah desa langsung bisa melakukan kegiatan penanganan dari anggaran yang tersedia.

Jika dalam setahun itu tidak ada kejadian bencana, maka dana tersebut dapat dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Dengan begitu akan kembali dapat digunakan dan dianggarkan untuk tahun anggaran berikutnya. "Sifatnya siap dibelanjakan. Kalau tidak terbelanjakan, maka jadi Silpa. Dan ini sekali lagi diingatkan, harus ditetapkan dalam musyawarah desa," jelas Fadly.

Mengenai kegiatan di desa untuk tahun anggaran 2021, sekarang sudah masuk tahap penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RK-PDes). Terkait dengan pengalokasian DD untuk setiap desa, masih dalam proses. Pembagian DD, selain ada alokasi dasar yang itu dibagi rata untuk semua desa, ada juga pembagian berdasarkan kategori desa.

"Alokasi per desa masih disesuaikan dengan kategorisasinya, apakah desa tertinggal, maju, atau desa mandiri dan lainnya. Saat ini sedang disusun oleh pendamping desa," bebernya. (huc)

Ulasan Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.

KOTA BENGKULU :
GRAHA PENA,
Jl. P. Natadiri No. 69 Km 7
Telp (0736) 22060 & (0736)-20882

CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria),
Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516

MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman
Simpang Tiga Ruklis, Telp (0739) 21407

• SUMUR BOR •
HERMANSYAH SINAGA, Perbaikan & Servis
Sumur Bor, Servis, Jil Purnis, Sumur Bekas, Dan Perbaikan (GIM) Hub. 08136772575/08578163529

• SUMUR BOR •
WFF BOR, Jasa Pembuatan Sumur Bor & Service, Hub. Andi Tjo/Wa 082346329870, A/L: Sukaraja Dusun II Bengkulu

• SUMUR BOR •
PM BOR, Menerima Pemb. Sumur Bor Dgn Mesin & Service, Hub. Irwan 08579259286, Airt.Jl. S. Paman 6 RT. 7 RW. 2 Pdg. Jati Bkl.

• JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas. SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

• KEHILANGAN •
1BPKB, No. 1.07523032 a/n Anwar Fauzi, Alamat Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang

• KEHILANGAN •
BPKB, Mobil Daihatsu 2013, BD1745AS, Noka, PM2M60251D2005235, Noshin, TG1A12K, A/n Widya Wulandari

• KEHILANGAN •
BPKB, Mobil Toyota, BD1137LL, Noka, MHF11KF83Y0015314, Noshin, 7K-0347000, A/n Chufuran

JUAL TANAH
Luas Tanah keseluruhan
323 m² (13 x 24,8), SHM.
Harga Rp. 1,5 jt per meter. NEGO
Lokasi: Jl. Barito bersebelahan dengan perumahan Barito, Padang Harapan Kota Bengkulu.
Minat Hubungi: Hp 08126625522

JUAL RUMAH
Ukuran Tanah 10 x 20 m

Fasilitas:
- 3 Kamar Tidur
- 2 Kamar Mandi
- 2 Ventilasi
- Harga Nego, Sertifikat Hak Milik
- Listrik 900 watt, Ventilasi Listrik Pula

Alamat: Jl. Flamboyan 1 Gang Vinsu 5 Rt. 11 Rw.04 Skip, Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratus Agung Kota Bengkulu.
Hubungi: Meby, Hp. 082372272717

DIKONTRAK RUMAH

Type 90 Lantai Granit Marmer
Air Sumur Boor, Kamar Mandi di Kamar Utama, Plafond Gipsus Minimalis, Carpet, Plafon Gipsus Lokasi Strategis di Kota Bengkulu
Jl. Sungai Rupat 1 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Hubungi Telp/WA 0823 7172 8128, 0822 7980 5330

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas :
3 Km Tidur, 1 R. Tamu, 1 R. Tv/Keluarga,
2 Teras Muka dan Belakang,
1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagar Besi dan Tembok
Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34
Kel. Padang Harapan Bkl
Hubungi :
0878 9496 1917
0819 1931 8688
(Berminat silahkan cek lokasi)

DIJUAL/ DIKONTRAKAN RUKO

Ruko 4 Pintu, (2 Lantai + Basement) Ukuran 4 x 16, Sumur Gali, Listrik 1.300 per pintu, Bangunan Kokoh
Jl. WR Supratman (Jl Raya Bentring)
Hubungi Telp/WA
0823 7172 8128,
0822 7980 5330

DIKONTRAKAN SATU RUMAH
Alamat: Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bkl.
Fasilitas:
- 3 kmr Tdr, 1 toilet, Teras Bkl, R. Dapur, R. Tamu, R. Klurga, R. Cuci Lemur dan R.Makan.
- AC, lemari baju, tmpt tdr, kursi tmu, kulkas, meja mkn, Jet PAM, listrik 1300 wat.
Harga 19 JT NEGO
Minat Hub. 081977004862/
08117315116

JUAL MOBIL

HONDA HRV TYPE E, MANUAL TH 2015, KM 31,000, STNK BARU, PAJAK BARU, SANGAT MULUS
HUB 087894710312

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Panas Atas
CURUP - 39153

Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sardien	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lela	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

POLING CABUP DAN CAWABUP RL PILIHAN PEMBACA RB

2

62

**Hj. Susilawati, SE, MM
H. Ruswan YS, S.Sos, M.Si**

1

16

**Dr. H. M. Faisal, SE, MM, MCO
Fotrizal, SE**

4

15

**M. Fikri Thohari, SE
Tarsisius Samuili, S.Pd**

3

13

**Syamsul Effendi, SE, MM
Mendra Wahyudiannyah, SH**

Ojek Pangkalan Dibegal Penumpang

Pelaku Ditangkap Warga

CURUP - Apes dialami M. Theo Alhakqito (18) seorang pengemudi ojek pangkalan warga Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur. Rabu (18/11) sore dirinya menjadi korban begal penumpangnya sendiri di kawasan Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang. Pelakunya adalah In (40) warga asal Desa Balai Buntar Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI).

Data terhimpun, saat itu korban sedang melintas di jalan umum Desa Air Meles Atas dan dihampiri pelaku. Saat itu pelaku ingin menyewa ojek korban dengan tujuan untuk mencari alamat rumah saudaranya yang berada di sekitaran kawasan Desa Air Meles Atas. Tanpa curiga korban membongceng pelaku untuk mencari alamat.

Namun rupanya, di tengah perjalanan diketahui pelaku berniat jahat dan ingin membegal korban. Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban dari belakang sembari meminta korban memberhentikan motornya. Korban rupanya nekat, bukan memberhentikan laju motor, namun korban mengarahkan laju motor dan menjatuhkan diri di drainase pinggir jalan sembari berteriak minta tolong.

"Saat itu, warga di sekitar kejadian mendengar teriakan korban yang terjatuh di drainase bersama pelaku. Warga kemudian memberi pertolongan sembari menangkap pelaku," terang Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kapolsek Curup Iptu Samsudin, SH kepada RB kemarin.

Ditambahkan Samsudin, pasca kejadian pelaku langsung diamankan anggota Polsek Curup guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap pelaku. "Untuk korban sudah kita mintai keterangan bersama beberapa saksi lainnya. Sedangkan pelaku sudah kita amankan beserta barang bukti guna kepentingan proses hukum," imbuh Samsudin. (dtk)



DIAMANKAN: Pelaku pembegalan pengemudi ojek pangkalan diamankan di Polsek Curup beserta barang bukti.

Ada Tambahan Selesai Konfirmasi

CURUP - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) kembali mencatat adanya penambahan selesai konfirmasi atau sembuh sebanyak 7 kasus. Ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kepada RB.

Dirincikan Syamsir masing-masing kasus 178 asal Kecamatan Curup, kasus 179 asal Kecamatan Curup Selatan dan kasus 188 asal Kecamatan Kota Padang. Selanjutnya kasus 194 asal Kecamatan Curup Tengah, kasus 196 asal Kecamatan Curup, kasus 226 asal Kecamatan Curup Selatan dan kasus 227 asal Kecamatan Curup Tengah.

"Hari ini kita mencatat ada tambahan selesai konfirmasi atau sembuh sebanyak 7 kasus. Dengan tambahan 7 kasus sembuh ini total yang sudah sembuh mencapai 206 kasus dan sebanyak 56 kasus masih pengawasan. Sedangkan untuk total kasus konfirmasi sampai hari ini mencapai 262 kasus," terang Syamsir.

Ditambahkan Syamsir, hingga kemarin tercatat pelaku perjalanan sebanyak 13.595 orang, suspek sebanyak 176 orang dan suspek discarded sebanyak 128 orang. Sedangkan untuk jumlah suspek di isolasi sebanyak 14 orang dan probable sebanyak 4 orang. "Untuk jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 1.633 sampel, yang 267 diantaranya hasilnya positif. Sedangkan yang dinyatakan negatif sebanyak 1.366 sampel," demikian Syamsir. (dtk)

Kasus Senpi Oknum Kades Dilimpahkan ke Polres Pemda Segera Siapkan Plt

CURUP - Penanganan kasus kepemilikan senjata api rakitan mirip jenis FN yang menyandung salah satu oknum kades di Kecamatan Sindang Beliti Ulu (SBU) berinisial Bu (33) dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Rejang Lebong (RL). Pelimpahan kasus tersebut dilakukan kemarin dari penyidik Unit Reskrim Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) kepada Unit Pidum Satreskrim Polres RL.

Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim AKP Ahmad Musrin Muzni, SH, S.IK kepada RB membenarkan hal tersebut kemarin. "Benar, hari ini kasus tersebut dilimpahkan dari Polsek PUT ke Satreskrim Polres Rejang Lebong. Untuk tersangka dan barang bukti sudah dikirim hari ini (kemarin, red)," singkat Musrin.

Terpisah, Sekda RL R.A. Denni, SH, MM mengungkapkan mereka sudah mendapatkan informais terkait oknum kades yang tersandung kasus kepemilikan senjata tersebut. Sehingga mereka akan segera mengambil langkah-langkah secara berjenjang agar kasus tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di desa yang dipimpin sang oknum kades.

Apalagi, sambung Denni, oknum kades tersebut informasinya sudah dilakukan penahanan di Polres RL. Sehingga mau tidak mau harus ada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kades agar roda pemerintahan di desa tersebut tetap berjalan. "Kita upayakan dulu penunjukan Plt, bisa itu sekretaris desa atau salah satu pejabat kaur," terang Denni.

Ditambahkan Denni, jika oknum kades tersebut sudah diputus di pengadilan proses hukumnya dan memiliki kekuatan hukum tetap serta bersalah, maka sanksi pemberhentian sudah menunggu. "Kita berharap pihak BPD setempat bisa segera rapat untuk mengajukan usulan PLT nantinya," demikian Denni. (dtk)

Sampai Gudang, Surat Suara Tetap Dalam Boks



SAMPAI: Surat suara sampai di gudang logistik dan diterima langsung Ketua KPU Kabupaten RL Drs. Restu Satrio Wibowo kemarin di gudang logistik.

Pembongkaran Tunggu Proses Sortir Lipat

CURUP - Logistik surat suara pilkada, kemarin sore sudah sampai di Kabupaten Rejang Lebong (RL). Surat suara diterima langsung Ketua KPU Kabupaten RL Drs. Restu Satrio Wibowo dengan disaksikan Bawaslu Kabupaten RL dan anggota TNI serta Polri. Logistik tersebut tidak langsung dibuka namun tetap berada di dalam boks.

Dijelaskan Restu, pembukaan box surat suara memang belum langsung dibuka melainkan disimpan di gudang tetap dalam boks pengiriman. Boks tersebut baru akan dibuka setelah nanti akan dilakukan proses sortir lipat oleh para petugas yang akan disipakan KPU.

"Memang belum kita buka, nanti tunggu saat proses sortir lipat nantinya," sambung Restu.

Dijelaskan Restu, rincian surat suara yang sampai tersebut yaitu sebanyak 200.577 Lembar Surat Suara. Untuk surat suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten RL masing-masing 193.642 lembar surat suara sesuai DPT dan 4.935 lembar surat suara Cadangan sebesar 2,5%. Serta ditambah 3.2000 Lembar Surat suara Pemilihan Suara Ulang (PSU).

"Total keseluruhan surat suara mencapai 200.577 lembar dan dikemas dalam 100 box yang masing masing berisi 2000 Lembar. Serta ditambah 1 box berisi 577 lembar surat suara. Sampai saat ini selain surat suara, juga sudah ada kotak dan bilik suara serta logistik tinta pilkada," demikian Restu. (dtk)

Tebas Bayang Tahap III Dimulai

Sudah Tiga Link Berjalan

CURUP - Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong (RL) mulai melaksanakan kegiatan tebas bayang tahap III. Dimana mereka saat ini sudah mulai melaksanakan di tiga link jalan secara bertahap sejak satu minggu belakangan.

Dijelaskan Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten RL

Yusran Fauzi, ST melalui Kabid BM Roni Saputra, ST kepada RB kemarin, link jalan yang sudah mulai dilaksanakan yaitu link Kecamatan Sindang Kelingi-Sindang Dataran dengan panjang jalan 53,83 km dan jumlahnya sebanyak 13 titik. Lalu Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT)-Binduriang-Sindang Beliti Ulu (SBU)-Sindang Beliti Ilir (SBI) sebanyak 18 titik disepanjang 81,20 km jalan.

"Sedangkan satu link lagi yaitu Kecamatan Kota Padang sebanyak 4 titik berada di sepanjang 22,3 km. Kita sudah mulai melaksanakan kegiatan tebas bayang tahap ketiga yang diawali di tiga link tersebut dan mudah-mudahan dalam bulan ini bisa selesai dilaksanakan," terang Roni.

Sedangkan untuk link lainnya, sambung Roni akan mulai dilaksanakan secara bertahap juga pada awal Desember 2020 mendatang. Rinciannya masing-masing link Kecamatan Curup-Curup Selatan-Curup Tengah sebanyak 30 titik disepanjang jalan dengan panjang 73,55 km. Link Kecamatan Curup Utara-Curup Timur sebanyak 18 titik di sepanjang 62,11 km jalan.

Serta, tambah Roni, link Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya sebanyak 12 titik disepanjang 45,19 km jalan. Link Kecamatan Selupu Rejang se-



MULAI: Petugas dari Dinas PUPRPKP Kabupaten RL mulai melaksanakan kegiatan Tebas Bayang Tahap III secara bertahap.

banyak 27 titik disepanjang 95,52 km jalan. "Seluruh jalan yang dilakukan tebas bayang ini merupakan jalan kabupaten. Mudah-mudahan seluruh selesai kita laksanakan sebelum tutup tahun," demikian Roni. (dtk)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG
Jl. S. Subandrio, Km. 04, Curup, Bengkulu 39124
Telp. (071) 214001, 214002, 214003, 214004

PERGUMUKAN
(Cetakan Setengah Tahun)
Nomor: 080-214000/PT/2020

Untuk mendapatkan komplek data, klik pada pengumuman ini. Jika mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan. Keputusan kepada kami, dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pengumuman, surat akan diterbitkan, maka surat pengumuman akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan surat yang diterbitkan tidak berlaku lagi.

No	PERUSAHAAN	DAFTAR	NO	PERUSAHAAN	DAFTAR
1	PT. SRI LINGGA	1000	11	PT. SRI LINGGA	1000
2	PT. SRI LINGGA	1000	12	PT. SRI LINGGA	1000
3	PT. SRI LINGGA	1000	13	PT. SRI LINGGA	1000
4	PT. SRI LINGGA	1000	14	PT. SRI LINGGA	1000
5	PT. SRI LINGGA	1000	15	PT. SRI LINGGA	1000
6	PT. SRI LINGGA	1000	16	PT. SRI LINGGA	1000
7	PT. SRI LINGGA	1000	17	PT. SRI LINGGA	1000
8	PT. SRI LINGGA	1000	18	PT. SRI LINGGA	1000
9	PT. SRI LINGGA	1000	19	PT. SRI LINGGA	1000
10	PT. SRI LINGGA	1000	20	PT. SRI LINGGA	1000

PROMO PALING MURAH DISKON PALING BESAR Agung TOYOTA

Agya Angsuran 2,6 Jt
Calya Angsuran 2,7 Jt
Avanza Angsuran 3,5 Jt
Pick Up Hilux Angsuran 4,9 Jt
Dyna Dump Truck Angsuran 8 Jt
Rush Angsuran 4,4 Jt
Innova Angsuran 5,6 Jt
Fortuner Angsuran 8,5 Jt

Promo Paling Murah Discon Paling Besar Buruan Hanya dibulan ini!

Jangan Malu Bertanya Yaa...
Melayani Pemesanan Mobil, Booking Service dan info Spare Part
Proses Cepat & Mudah Bertanggung Jawab

Minat...??? Hubungi Anto, S.Sos
HP/WA : 0852 6869 8619
Facebook : Irwanto SSOS

JUAL & ISI ULANG
TABUNG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) - GUARANTEED

CEGAH KEBAKARAN DI RUMAH ANDA???

GUNAKAN APAR

- Aman
- Praktis
- Ekonomis

Kami Siap Antan Ke Rumah Anda

-0813 6778 7901
-0812 6169 4484
-0823 76 77776
-0736 52881

DAIHATSU OKTOBER GERIA

SIGRA 1000	DP 8 Juta
SIGRA 1200	DP 9,8 Juta
AYLA 1000	DP 2 Jutaan
AYLA 1200	DP 7 Jutaan
XENIA	DP 15 Juta
GRANDMAX	DP 18,5 Juta
TERIOS	DP 28 Juta

Proses aman dan Minyak FULL

Hub. YAZID Hp/ WA: 0852 6989 4916

PROMO AKHIR TAHUN 2020 Agung TOYOTA

AGUNG TOYOTA BENGKULU

Agya	Dp 27 Jutaan
Calya	Dp 17 Jutaan
Avanza	Dp 24 Jutaan
Veloz	Dp 33 Jutaan
Rush	Dp 58 Jutaan
Yaris	Dp 65 Jutaan
Innova	Dp 83 Jutaan
Corolla Cross	Dp 120 Jutaan
Fortuner	Dp 110 Jutaan

Info Pemesanan Toyota
Hubungi Marketing :
AFNI AL MUCHLISIN
HP: 0823 7176 2728 - WA: 0853 6765 0885

POLING CABUP DAN CAWABUP KEPAHIANG PILIHAN PEMBACA RB



2

130

Hidayatullah Sjahid
H. zurdinata, S.IP



1

45

Ujang Syarifudin
Firdausi

TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

01 26 September - 5 Desember 2020
Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyusunan Bahan Kampanye Kepada umum, Pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain

02 26 September - 5 Desember 2020
Debat Publik/ Terbuka antar Pasangan Calon

03 22 November - 5 Desember 2020
Kampanye Melalui media masa, cetak dan elektronik

04 6 Desember - 8 Desember 2020
Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

Laporan Awal Dana Kampanye
Penyerahan : 25 September 2020
Pengumuman : 26 September 2020

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Penyerahan : 31 Oktober 2020
Pengumuman : 1 November 2020

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Penyerahan : 6 Desember 2020
Pengumuman : 7 Desember 2020

Masa Audit : 7 Desember - 21 Desember 2020
Penyampaian KAP ke KPU Kab. Kepahiang : 7 Desember 2020
Penyampaian KPU ke Paslon : 23 - 25 Desember 2020
Pengumuman Hasil Audit : 23 - 25 Desember

Dewan Pertanyakan Ketegasan Pertamina

Penjualan Elpiji 3 Kg di Atas HET

KEPAHIANG - Masih banyaknya agen atau pangkalan gas elpiji 3 Kg atau gas melon yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), menarik perhatian DPRD Kabupaten Kepahiang. Sentilan pun datang dari anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, Eko Guntoro, SH. Dia mempertanyakan ketegasan PT Pertamina dalam mendisiplinkan agen atau pangkalan yang tetap bandel.

Hal ini disampaikan Eko mengingat banyaknya keluhan yang muncul dari masyarakat terkait harga gas melon saat ini masih di angka Rp 22 ribu hingga Rp 25 ribu per tabung 3 Kg. Harusnya Pertamina bertindak tegas terhadap agen atau pangkalan yang menyalurkan elpiji 3 Kg yang tidak sesuai dengan ketentuan baik harga maupun proses penjualannya.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah terkait dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam hal pengawasan di daerah terkait distribusi gas bersubsidi tersebut. Pihaknya menyarankan agar OPD memperoleh akses informasi dan dokumen izin resmi pangkalan gas LPG 3 Kg sehingga mempermudah pengawasan.

"Persoalan yang ada saat ini selain pangkalan, warung-warung juga menjual gas elpiji di atas HET. Harapan kita dengan adanya peraturan terkait pendistribusian dan pengawasan gas elpiji penjualan hanya di tingkat pangkalan saja, jika ada pangkalan yang menjual di atas HET, maka harus disanksi," tegas Eko.

Eko menjelaskan, koordinasi antara agen dengan OPD diharapkan dapat memastikan setiap desa terdapat pangkalan gas elpiji. Sehingga distribusi gas setiap bulannya dapat dinikmati oleh masyarakat.

"Pangkalan yang dapat mengecer gas elpiji itu agar dipastikan ada di setiap desa. Peraturannya jelas, gas 3 kilogram bersubsidi tersebut diperuntukan bagi masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro. Jangan ada permainan, apalagi dijual di atas HET. Apalagi saat ini masyarakat tengah menghadapi pandemi Covid-19 jangan lagi dipersulit dengan kelangkaan gas elpiji," tukas Eko.

Sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Kabupaten Kepahiang, Husni Thamrin, SE yang mengatakan bahwa pihaknya belum mampu melakukan penertiban terhadap peredaran gas melon tersebut. Pasalnya kewenangan yang terkait pengawasan gas melon sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dibawah naungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu.

"Sejak Dinas ESDM tidak ada di kabupaten, jadi pengawas untuk gas elpiji dan BBM itu dibawah naungan provinsi. Sehingga kita tidak bisa melakukan pengawasan dan penertiban atas peredaran gas melon ini. Bahkan untuk kuota gas melon di Kepahiang saja kita tidak diberitahu," ungkap Husni.

Kemudian terkait HET, sambung Husni, diatur oleh Pergub, bukan Perbup. Sehingga sangat susah bagi pemkab untuk ikut mengatur penjualan gas melon. "Tugas kami hanya sebagai pendamping saja jika ada pihak dari provinsi atau Pertamina yang akan melakukan pengawasan. Jadi bukan kami yang mengawasi," bebernya.

Hanya saja ia menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka pintu pengaduan bagi masyarakat mengenai peredaran gas melon. Masukan dan pengaduan dari masyarakat akan dijadikan materi untuk menyuarai Pemprov Bengkulu. "Untuk di daerah ini Pemprov hanya melakukan kontrak dengan agen yang ada di pangkalan daerah. Di Kepahiang ini hanya ada 2 pangkalan elpiji yang terdapat dalam pengurusan SIUP kepada kita. Untuk hal lain, jelas kita tidak memiliki kewenangannya," demikian Husni. (sly)

KAMPANYE PILKADA 2020

Jangan menghinia, merasusut, memfitnah & mengadu domba!

AYO...! AWASI & LAPORKAN

Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Melalui: **Larangan**

- Mempersoalkan dasar negara, Pancasila, UUD 1945 & NKRI
- Kampanye di tempat ibadah & pendidikan
- Menggunakan fasilitas & anggaran pemerintah
- Memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye
- Mencetak & menyebarkan bahan kampanye di luar ketentuan
- Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing/tidak jelas identitasnya
- Merusak & menghilangkan alat peraga kampanye
- Menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya untuk memengaruhi pemilih
- Menghinia seseorang, agama, suku, ras, golongan paslon
- Menganjurkan hingga menggunakan ancaman & kekerasan
- Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih

Oknum Dewan Provinsi Dilaporkan ke Bawaslu

Diduga Penyebaran Informasi Bohong

KEPAHIANG - Oknum anggota DPRD Provinsi Bengkulu berinisial Za, kemarin (19/11) dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 2 Hidayatullah - Nata, ke Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Za diduga telah melakukan perbuatan penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian pada saat kampanye di Kecamatan Seberang Musi beberapa waktu lalu.

Dikemukakan Kuasa Hukum Paslon Nomor 2, Dede Frastien, SH, dari bukti yang dimiliki pihaknya berupa rekaman video berdurasi 1 menit 31 detik, Za telah mengucapkan kalimat yang mengandung fitnah dan tidak beralasan. Pebuatan tersebut ditenggarai bertujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat agar bisa memilih pasangan calon yang didukung Za pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Dasar kami menyampaikan laporan ini karena menginginkan pemilu di Kepahiang berlangsung damai dan sejuk, sehingga menghasilkan pemimpin Kabupaten Kepahiang yang berintegritas," ujar Dede Frastien.

Dede mengatakan, bahwa perbuatan oknum Za disinyalir sudah merendahkan dan mencemarkan nama baik Paslon nomor urut 2. Dugaan pelecehan secara verbal dan menyebarkan ucapan-ucapan



LAPORAN: Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 2, melayangkan laporan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

pan buruk yang mengandung kebencian terhadap calon lain. Terlebih akhir-akhir ini sudah sangat banyak ujaran kebencian yang beredar.

Ironisnya ucapan itu disebarkan secara luas melalui jejaring sosial atau media sosial (Medsos). Diantaranya lewat grup whatsapp. Jika tidak ditindak, Dede khawatir perbuatan tersebut akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Kabupaten Kepahiang.

"Kekerasan secara verbal sudah samkin parah diterima oleh pihak paslon nomor 2. Dan laporan ini disampaikan dengan harapan bisa memberikan contoh kepada para politisi dan tokoh-tokoh politik di Kabupaten Kepahiang supaya tahu apa itu berkampanye sopan agar Pilkada di Kepahiang berjalan damai," jelasnya.

Lebih lanjut Dede mengatakan, jika merunut pada aturan hukum yang berlaku, maka ucapan yang disampaikan oknum Za tersebut

melanggar Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota serta Pasal 187 ayat (2) dan ayat (3).

Kemudian Pasal 69 huruf b karena menghinia seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota dan partai politik. "Kita mendapatkan video itu sekitar tiga hari lalu, sehingga kita putuskan untuk melapor ke Bawaslu Kepahiang. Kita berharap ada tindakan yang bisa diambil oleh Bawaslu mengenai persoalan ini," pungkasnya.

Sementara itu, minimnya sikap tegas Pemkab Kepahiang dalam penerapan protokol kesehatan, dikeluhkan oleh sebagian

Tinggal Dua Kecamatan Zona Kuning

29 Positif Covid, 4 Meninggal Dunia

KEPAHIANG - Angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kepahiang tercatat sudah 109 orang, dengan rincian 29 orang masih dinyatakan positif, 4 orang meninggal dunia, dan 76 orang telah selesai isolasi. Selain itu, dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, hanya tersisa 2 kecamatan yang masih berstatus zona kuning. Yakni Seberang Musi dan Tebat Karai.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Tajri Fauzan, S.KM, M.Si mengungkapkan, penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kepahiang yang cukup tinggi disebabkan oleh banyaknya acara pesta pernikahan yang dilakukan warga belakangan ini. Sebab ramainya orang-orang berkerumun di Pesta Pernikahan membuat sebaran covid sulit dideteksi. "Klaster pasar dan pesta pernikahan sekarang jadi ancaman nyata sebaran Covid-19," ungkap Tajri.

Untuk itu, Tajri mengingatkan seluruh pihak, agar bisa bergerak bersama melawan penyebaran covid dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Kondisi saat semua tergantung dengan diri masing-masing, jika mau terhindar tentunya ini protokol kesehatannya," ucap Tajri.

Sementara itu, minimnya sikap tegas Pemkab Kepahiang dalam penerapan protokol kesehatan, dikeluhkan oleh sebagian

warga. Beberapa warga menilai, Pemkab terkesan setengah hati melakukan penanganan penyebaran Covid-19 walaupun saat ini sudah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) Kepahiang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepahiang.

"Kalau mau tegas dalam menerapkan Perda, ya harus merata di seluruh lini. Jangan cuma diterapkan di kalangan tertentu saja. Kalau memang banyak penyebaran dari acara hajatan pernikahan, kenapa Pemkab malah memperbolehkan warga kembali menggelar pesta," tanya Riki (30), salah satu warga Dusun Kepahiang.

Hal serupa juga diungkapkan, Rian Saputra (33) yang menyayangkan kurangnya sikap tegas pemerintah dalam menekan angka penyebaran covid-19. Menurutnya penerapan Perbup New Normal, hanya diberlakukan pada masyarakat pengguna jalan raya yang tidak melengkapi protokol kesehatan, serta di beberapa tongkrongan anak muda saja.

"Coba Pemkab tuh razia di warung-warung makan yang ada di Kepahiang pada siang hari, banyak yang melanggar proses dalam pelayanannya. Kemudian lihat juga di pasar-pasar dan pesta pernikahan, bahkan di areal perkantoran Pemkab sendiri pun proses kerap terabaikan. Kenapa tidak ada penindakan tegas untuk hal itu," demikian Rian. (sly)

TWA Bukit Hitam Dibangun Tahun Depan

Setelah Tertunda

KEPAHIANG - Sempat tertunda lantaran adanya pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19, pembangunan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Hitam kembali diusulkan di tahun anggaran 2021. Dalam usulan yang sudah diakomodir

melalui RAPDB 2021 tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang berencana akan membangun gerbang utama sebagai pintu masuk TWA.

Diungkapkan Kepala Disparpora Kabupaten Kepahiang Tedy Adeba, ST bahwa pembangunan gerbang TWA

Bukit Hitam sejalan dengan program pengembangan wisata di tahun 2020. Karena tahun ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Kelompok Pemuda Sadar Wisata (Pokdarwis) yang akan mengelola objek wisata TWA Bukit Hitam.

"Pokdarwis sendiri sudah melakukan pendakian un-

tuk menentukan jalur wisata TWA Bukit Hitam. Jadi ditahun depan kita akan bangun gerbangnya, target kita nanti bisa dilengkapi dengan area bumi perkemahan, race area dan fasilitas pendukung lainnya," jelasnya.

Dibukanya wisata TWA Bukit Hitam akan menambah destinasi wisata alam andalan Kabupaten Kepahiang. Sebab Bukit Hitam memiliki wahana wisata Kawah Hitam, Air Tejun hingga jalur pendakian menantang. Sehingga sangat cocok bagi para wisata yang hobi memacu adrenalin ketika belibur. "Pencarian jalur sudah dilakukan, informasi mereka ada wahana kawah mati sangat indah. Kawah mati ini adalah yang merupakan letusan pertama dipublikasikan itu," terang Tedy.

Terkait dengan anggaran pembangunan gerbang, race area dan lokasi bumi perkemahan di kaki TWA Bukit Hitam tersebut, Tedy mengatakan masih dalam proses perhitungan dibagian perencanaan. Uukurrannya akan disesuaikan dengan ketersediaan dana Disparpora.

"Pemanfaatan TWA Bukit

Hitam ini nantinya juga bekerjasama dengan BKS-DA Provinsi Bengkulu. Bahkan sebelum adanya wabah Covid-19, Disparpora sudah melakukan sosialisasi kepada sejumlah BUMDes di sekitar kawasan untuk mempersiapkan rencana kerjasama pengelolaan," beber Tedy.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemberdayaan BUMDes tersebut untuk bekerja sama membangun kawasan TWA Bukit Hitam. Pasalnya untuk menuju TWA Bukit Hitam tersebut banyak jalur yang bisa dilewati. Mulai dari Desa Air Sempiang dan bisa juga melewati desa lainnya. Dengan itupula nantinya BUMDes bersama akan dibentuk untuk pemanfaatannya.

"Sosialisasi kepada masyarakat sudah kita sampaikan, dengan harapan ketika kita memanfaatkan TWA bukit hitam bila dipungut retribusi masyarakat tidak terkejut lagi. Semoga saja tahun depan kita bisa mendapatkan anggaran DAK dan pandemi wabah Covid-19 ini sudah berakhir, sehingga sejumlah pembangunan lain yang direncanakan bisa direalisasikan," demikian Tedy. (sly)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

MENGIMBAU KEPADA MASYARAKAT

Untuk Mewaspada Ancaman Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, Pohon Tumbang, dan Puting Beliung)

Serta Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan dengan Melakukan 3M+1 Dalam Masa Pandemi Covid-19



Pt Bupati
Netti Herawati, S.Sos



Kepala BPBD ex. Officio
Zamzami Zubir, SE, MM



Kepala Pelaksana BPBD
Ir. Taufik

Call Center BPBD Kepahiang : 0812 7878 5566

Selamat Tinggal, Selamat Kembali

TELEPON PENTING

Call Center Polsek Karang Tinggi :

Perwira PengHubung :	081278617339
RSUD Benteng :	081368965552
Pos A Nakau :	085279125960
Pos B Meringgi Sakti :	085279125930

2021, DD Prioritas untuk BUMDes

BENTENG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), mengintruksikan kepada 142 Pemerintah Desa (Pemdes) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga pada tahun 2021 mendatang seluruh dana desa (DD) yang didapatkan oleh Pemdes lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala DPMD Benteng Drs Tomi Marisi MSI melalui Kabid Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Debby Septika, SSTP M.Si menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) terbaru, perihal penggunaan DD tahun 2021 mendatang untuk penggunaan DD tahun 2021 tidak lagi di titik beratkan ke pembangunan fisik atau infrastruktur. Melainkan diwajibkan untuk memprioritaskan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Dari 142 desa saat ini, diketahui jika saat ini 140 desa sudah memiliki BUMDes dan tinggal dua desa lagi yang hingga saat ini belum memiliki BUMDes. Terhadap dua desa lagi yang belum memiliki BUMDes, kita berharap segera dibentuk, hal ini dikarenakan demi meningkatkan perekonomian yang ada di desa tersebut," ungkapnya.

Dia menambahkan, setiap desa diminta untuk menggali potensi di wilayah masing-masing agar bisa memberi manfaat jangka panjang. Seperti pengembangan kawasan wisata, ekonomi kreatif ataupun kegiatan lainnya. Dengan begini kedepan perekonomian yang ada di setiap Desa bisa kembali pulih karena saat ini sangat terdampak dengan adanya wabah Covid-19 saat ini.

"Dari semua BUMDes, beberapa sudah maju dan bisa menjadi percontohan. Seperti BUMDes di Desa Bukit, Desa Rindu Hati, Talang Pauh dan BUMDes di Desa Pekik Nyaring. Dalam menindaklanjuti rencana ini kita Dinas PMD bekerjasama dengan universitas ternama di Provinsi Bengkulu agar pengembangan BUMDes lebih optimal," jelasnya.

Lanjutnya, semoga dengan rencana ini, semoga BUMDes ini kedepannya bisa berkembang dengan pesat, sehingga bisa berdampak dengan perekonomian masyarakat. Selain itu dengan tidak adanya kenaikan anggaran yang didapatkan desa dan harus memprioritaskan peningkatan perekonomian maka konsekuensinya harus mengurangi kegiatan pembangunan fisik.

"Kemudian selain itu dengan adanya intruksi mengenai penggunaan DD untuk diprioritaskan untuk peningkatan perekonomian yang ada di desa ini, maka beberapa kades sudah berkonsultasi dan meminta agar diberi pendampingan terhadap rencana penyer-taan modal terhadap BUMDes," pungkasnya. (jee)



INOVASI: Bappeda Benteng saat menggelar sosialisasi inovasi daerah, demi meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pemanfaatan potensi daerah.

127 Perangkat Desa Diberi Waktu 7 Tahun

Untuk Dapatkan Ijazah SMA

BENTENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng), akhirnya merespon permintaan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Benteng untuk memberikan waktu pada 127 perangkat desa mendapatkan ijazah SMA sederajat. Dengan ini secara tidak langsung meminta penundaan penerapan Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Perangkat Desa. Yang mensyaratkan perangkat desa memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Dalam Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Pemkab Benteng diketahui jika 127 perangkat Desa diberikan kesempatan paling lama selama tujuh tahun untuk menempuh pendidikan hingga jenjang SMA.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Benteng, Drs, Jaka Santoso menjelaskan, dalam SE tersebut, Pemkab Benteng membatasi paling lama tujuh

tahun untuk perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA. Akan tetapi batasan waktu yang diberikan oleh Pemkab berbeda-beda, karena harus sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh perangkat desa.

"Seperti untuk perangkat desa yang belum mendapatkan ijazah SD, SMP dan SMA diberikan waktu selama tujuh tahun untuk menempuh pendidikan SMA hingga mendapatkan ijazah SMA. Kemudian bagi perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMP dan SMA diberikan waktu selama empat tahun untuk menempuh hingga pendidikan SMA dan mendapatkan ijazah SMA," jelasnya.

Dia menambahkan, terakhir bagi perangkat desa yang belum mendapatkan ijazah SMA diberikan waktu selama tiga tahun untuk menempuh pendidikan SMA dan mendapatkan ijazah SMA tersebut. Untuk jumlah keseluruhan perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA sebanyak 127 orang, dari jumlah tersebut 52 orang diantaranya tidak tamat SD.

"Kemudian untuk perangkat desa yang tidak tamat SMP sebanyak 64 orang dan perangkat desa yang tidak tamat SMA berjumlah 11 orang. Jadi sebanyak 127 orang yang belum memiliki ijazah SMA ini harus menempuh pendidikannya sesuai batasan waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan pendidikan terakhir," tegasnya.

Apabila perangkat desa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi syarat yang ada di dalam SE tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, maka perangkat desa yang bersangkutan harus diberhentikan. Hal ini harus dilakukan karena Pemkab Benteng sudah memberikan kesempatan.

"Semua ini harus dilakukan dan penuhi oleh perangkat desa, sebab selainnya semuanya sudah diatur dalam Perda Nomor 9 tahun 2020. Peraturan ini juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa," tutup Jaka. (jee)

Tingkatkan Inovasi, Manfaatkan Potensi Daerah

BENTENG - Demi memanfaatkan potensi daerah, kemarin (19/11) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Benteng, menggelar sosialisasi inovasi daerah. Kegiatan ini digelar dalam rangka menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Benteng, dari tingkatan teratas hingga tingkatan bawah.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Drs. Matheos Tan, MM menjelaskan, menciptakan inovasi ini merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Baik itu dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik dan menciptakan suatu hal yang baru. Sehingga dengan langkah melaksanakan inovasi ini, kepala daerah dituntut untuk berkomitmen kepada setiap OPD agar bisa melaksanakan hal tersebut.

"Kemudian inovasi yang sudah dilakukan ini, kita Kemendagri meminta untuk menyampaikan laporan. Dengan laporan yang diberikan oleh setiap Pemda ini nantinya akan kita mengevaluasi, mengapresiasi dan memberikan suatu penghargaan kepada Pemda yang disebut dengan inovasi government awards," jelasnya.

Dia menambahkan, ini sudah menjadi program tahunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kerja Pemda. Setiap tahunnya Kemendagri memberikan penghargaan kepada lima provinsi terinovatif, 10 kabupaten/kota terinovatif, dan tiga daerah tertinggal dan tiga daerah perbatasan terinovatif. Selain itu Kemendagri juga akan memberikan trofi penghargaan, piagam peng-

hargaan dan Dana Isentif Daerah (DID).

"Satu lagi saya ingatkan inovasi bukanlah suatu urusan, tetapi inovasi ada di semua urusan. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan supaya inovasi di Kabupaten Benteng ini bisa di tingkatkan dan dikembangkan demi kemakmuran masyarakatnya," ujarnya.

Lanjutnya, sebenarnya untuk di Benteng ini Inovasinya sudah ada, tinggal lagi Pemda Benteng harus mendokumentasi mencatat dan melaporkan kepada Kemendagri. "Dengan hadirnya Bupati Benteng dalam kegiatan ini, suatu bentuk kepedulian kepala daerah terhadap inovasi, tinggal lagi Bupati melanjutkannya kedalam praktiknya," demikian Theo.

Di tempat yang sama, Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH menjelaskan, melalui kegiatan yang digelar ini, ia meminta kepada seluruh OPD, ASN dan pemerintah desa untuk betul-betul bekerja, berfikir dan berinovasi untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Benteng ini. Baik itu potensi pariwisata, potensi di bidang pertanian, perkebunan dan pembangunan yang ada di Benteng.

"Dengan mereka bekerja dan berinovasi bisa membangun dan membuat kemajuan yang ada di Benteng, seperti OPD yang ada di Pemerintahan Benteng ini mereka harus memikirkan inovasi untuk memajukan Benteng ini sesuai Bidang yang ada di setiap OPD mereka. Begitu juga pemerintah desa, mereka bisa memanfaatkan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di setiap desa," jelasnya.

Dia menambahkan, apabila semua ini sudah dilakukan, maka akan sangat berdampak demi membangun, memajukan dan memperkalkan Kabupaten Benteng

Bappeda Benteng Gelar Sosialisasi Inovasi Daerah

Tingkatkan Kualitas SDM Demi Pemanfaatan Potensi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Benteng, kemarin (19/11) bertempat di ballroom hotel Puncak Tahura menggelar sosialisasi inovasi daerah. Kegiatan ini digelar dalam rangka menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan potensi daerah Kabupaten Benteng.

Pemateri dalam kegiatan sosialisasi ini turut hadir, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Drs. Matheos Tan, MM, kemudian ada juga Kabid Litbang Bappeda Provinsi Bengkulu, Leni Gustiani, Sp, M.Si dan Kepala Balitbang Musi Rawas, H. Bambang Hermanto, SE, MM. Kepala Bappeda Benteng, Nirzawan, SH, M.Si mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi inovasi daerah ini digelar untuk memotivasi seluruh kepala OPD, Kepala Bidang, Camat, ASN hingga ke tingkat bawah para Pemerintah Desa untuk menciptakan hal yang baru demi kemajuan Kabupaten Benteng dan Kesejahteraan masyarakat. Seperti menciptakan potensi-potensi yang ada di setiap desa dan menciptakan program baru yang bias ditonjolkan di setiap OPD yang ada. (jeri/prw)



NIRZAWAN: Kepala Bappeda Benteng Nirzawan selaku moderator memulai kegiatan sosialisasi inovasi daerah.



BUPATI: Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH selaku Bupati Benteng membuka secara resmi acara kegiatan sosialisasi inovasi daerah.

KEPALA BAPPEDA: Nirzawan selaku Kepala Bappeda Benteng saat menjelaskan tujuan dan maksud dari acara sosialisasi Inovasi Daerah.



PENYERAHAN: Bupati Benteng saat memberikan pelakat secara simbolis kepada Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebagai pemateri.



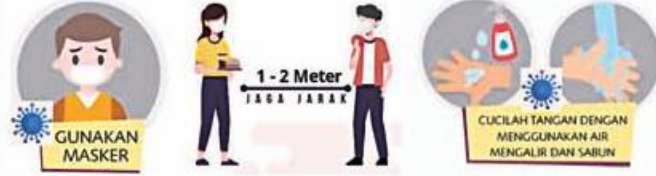
PESERTA: Terlihat seluruh Kepala OPD, Camat, ASN dan Perangkat Desa hadir dalam sosialisasi inovasi daerah.



KHUSYUK: Bupati dan para peserta yang hadir dalam sosialisasi inovasi daerah berdoa demi kelancaran acara.



PELAKAT: Bupati Benteng didampingi oleh Kepala Bappeda saat memberikan pelakat kepada ketiga pemateri sosialisasi inovasi daerah.



LINTAS



PEMBATAS JARAK: Restoran Hotel Mercure Bengkulu membatasi pelayanan dengan pembatas jarak sesuai prokes.

Restoran Hotel Berbintang Terapkan Prokes Restoran

BENGKULU - Pada masa pandemi Covid-19, restoran hotel berbintang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Protokol kesehatan tersebut ditunjukkan tidak hanya untuk pengunjung, tetapi juga staf restoran.

Marketing Communication Hotel Mercure Bengkulu, Putri Cempaka mengatakan, Restoran Hotel Mercure Bengkulu adalah salah satu restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan. "Protokol kesehatan tersebut di antaranya, penyusunan tempat duduk yang ada harus dipastikan sesuai standar kebiasaan baru yang berlaku, dan staf wajib memakai alat pelindung seperti masker, ataupun pelindung wajah," katanya.

Tidak hanya itu, staf juga harus mengganti daftar menu cetak menjadi bentuk digital agar dapat mengurangi kontak fisik dengan pengunjung, serta tidak melakukan pre-setting atau persiapan pelayanan restoran seperti, alat meja, peralatan makan, garam, dan merica di atas meja.

"Perubahan pada masa pandemi membuat kami harus dapat menjalani kebiasaan baru, dan membuka sebuah peluang," paparnya. (hkm)

Satgas Covid-19 Bakal Tentukan Izin Kegiatan

BENGKULU - Pemerintah Kota Bengkulu melalui Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 akan menertibkan setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti pernikahan, sosialisasi atau pun pertemuan.



SELUPATI

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Selupati, SH mengatakan, sejak 21 Juli 2020 hingga 21 September 2020, pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 841 rekomendasi pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi. Sehingga, apapun kegiatan yang melibatkan banyak orang, agar membuat pengajuan izin ke Satgas Covid-19 yang dipusatkan di Markas BPBD Kota Bengkulu.

"Silakan ajukan izin, apapun bentuknya nanti akan kita tindak lanjuti," kata Kepala BPBD Kota Bengkulu, Selupati, SH.

Menurutnya, pada dasarnya seluruh kegiatan harus tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan. Pihaknya, akan menentukan jumlah orang berdasarkan melihat ke lokasi dan layout tempat kegiatan. "Dari situ akan kita sesuaikan jumlah orang dengan kapasitas lokasi. Dan tidak boleh melebihi kapasitas yang ada. Kecuali mau mengadakan per sesi, misal dalam satu pertemuan ada beberapa sesi," ujarnya. (zie)



JUMPA PERS: Kepala OJK Provinsi Bengkulu Tito Adji saat jumpa pers kemarin.

Dampak Covid Terhadap Industri Asuransi

BENGKULU - Industri asuransi umum tercatat mengalami penurunan kinerja seperti pendapatan premi. Hal ini karena tekanan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh sektor, termasuk asuransi. Risiko tak terduga itu meliputi sakit, kecelakaan, meninggal dunia, biaya pendidikan, kerugian bisnis, kerusakan properti dan kendaraan, dan sebagainya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Tito Adji. S menyebutkan, asuransi seakan telah menjadi kebutuhan di saat darurat, terlebih masa pandemi seperti sekarang. "Namun Covid-19 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun dan pendapatan turun, sehingga permintaan asuransi otomatis turun dan akhirnya industri asuransi bisa mengalami kerugian," katanya.

Disisi lain anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yudi membenarkan bisnis asuransi di mana kinerjanya dipengaruhi oleh perekonomian global. "Penurunan juga terjadi pada asuransi kendaraan bermotor, hal ini karena lesunya penjualan motor dan mobil di masa pandemi," paparnya. (hkm)

Kepala Daerah Harus Larang Semua Kegiatan Kerumunan

Yang Berpotensi Melanggar Protokol Kesehatan Covid19

JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Letjen TNI Doni Monardo kembali mengingatkan kepada semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

"Untuk itu, siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang. Demi menyelamatkan rakyat kita agar terhindar dari penularan virus Covid 19," ungkap Doni kepada wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta Kamis 19 November 2020.

Sebelumnya, Doni juga telah melakukan percakapan via telpon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Ia menyampaikan, belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun di masa mendatang. "Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati," tegasnya.

Doni berharap para Gubernur, Pangdam dan Kapolda bisa segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan ke publik bahwa di masa pandemi ini kita harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

"Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, mem-



INGATKAN: Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Letjen TNI Doni Monardo kembali mengingatkan kepada semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa.

beri contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," kata Doni.

Menurutnya, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah, dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan.

"Makanya saya minta kepada semua pemimpin di daerah untuk melakukan pencegahan, mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain," tegas mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

"Kalau massa sudah berkumpul dan kita bubarkan maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasti jatuh korban. Makanya harus tegas sejak awal, agar kerumunan yang melanggar protokol kesehatan tidak terjadi. Ingat, covid ini nyata, bukan konspirasi. Yang meninggal di Indonesia sudah lebih 15 ribu orang, dan dunia

lebih 1,5 jt jiwa," sambungnya.

Doni berjanji, akan menelpon satu persatu semua Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia untuk mengingatkan agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa. "Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan maka kita sudah melindungi rakyat kita," tambahnya.

Menurut Doni, percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi. Menghindari kerumunan, salah satunya, menjadi langkah yang nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut. "Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Doni. (rls)

Pandemi, Tamatan Sekolah Dominasi Orang Bekerja

BENGKULU - Meski masa pandemi Covid, namun sampai bulan Agustus 2020 lalu, penduduk Bengkulu yang bekerja terserap ke lapangan kerja, masih didominasi berpendidikan rendah setara Sekolah Dasar (SD) sederajat dengan prosentase 37,52 atau sebanyak 387.143 orang. Selanjutnya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menempati peringkat kedua dengan jumlah sebanyak 188.699 orang atau 18,29 persen.

Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Ir. Win Rizal mengatakan dari pendidikan rendah yang bekerja ini jika ditotal mencapai 575.842 orang atau sebesar 55,81 persen. "Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 145.964 orang atau 14,15 persen yang terdiri dari 27.747 orang berpendidikan Diploma atau 2,69 persen dan

118.217 orang atau 11,46 persen berpendidikan Universitas," jelasnya kepada **RB**. Sementara kata Win Rizal, dalam setahun terakhir Agustus 2018-Agustus 2019 yang terjadi di Provinsi Bengkulu penduduk bekerja berpendidikan menengah bertambah sebanyak 10.962 orang atau naik sebesar 3,66 persen. Berdasarkan data pada Agustus 2019 penduduk bekerja tamatan SMA diangka 208.894 orang atau 20,84 persen, namun pada Agustus 2020 angkanya berubah mengalami kenaikan menjadi 231.807 orang atau 22,46 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Bengkulu Prof. Dr. Kamaludin, SE, MM mengatakan rendahnya pendidikan orang bekerja di Bengkulu memerlukan keterampilan tambahan bagi mereka. (iks)

LULUSAN	SUDAH BEKERJA	PERSENTASE
Sekolah Dasar	387.143 ORANG	37,52
Sekolah Menengah Pertama	188.699 ORANG	18,29
Sekolah Menengah Atas	231.807 orang	22,46
Perguruan Tinggi	145.964 orang	14,15



Masa Pandemi, Jam Kunjungan Ditambah

Di Benteng Marlborough dan Rumah Bung Karno

BENGKULU - Dulunya, jadwal kunjungan ke objek wisata sejarah Benteng Marlborough pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Berada di era normal baru masa pandemi covid-19 sekarang ini, entah secara kebetulan atau tidak, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bengkulu mendapatkan surat pemberitahuan jika jadwal kunjungan wisatawan ditambah mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Kadispar Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan mengatakan surat pemberitahuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah diterima pihaknya. Sebelumnya pihaknya memang menyurati pihak Balai perihal penambahan jam kunjungan bagi wisatawan ke Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Dalam surat tersebut dijelaskan, pada prinsipnya pihak Balai mendukung penambahan jam kunjungan tersebut.

"Kunjungan dibuka pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB," kata Irsan. (zie)



DISWAB: Pegawai BPKP saat diambil swab.

Terapkan 3 T, Antisipasi Klaster Perkantoran

BENGKULU - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menghadirkan laboratorium mini swab di lingkungan perkantoran. Dalam rangka penerapan 3 T, yaitu tracing, testing dan treatment sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto, menerangkan, laboratorium mini untuk swab antigen/antibody cegah penularan Covid-19 (Minilab Covid-19) merupakan kerja sama antara BPKP Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bengkulu. Minilab ini akan beroperasi selama 2 kali dalam seminggu.

"Minilab ini non komersial, gratis tidak ada dipungut biaya. Untuk saat ini diper-

untukan hanya bagi pegawai BPKP, karyawan Pelindo beserta keluarganya," ujar Iskandar.

Lanjutnya, untuk mitigasi resiko penularan Covid-19, minilab Covid-19 BPKP Bengkulu memprioritaskan pegawai yang dinas dari dan ke luar kota. Serta pegawai ataupun keluarga pegawai yang teridentifikasi kontak erat dengan pasien Covid-19 untuk mendapatkan layanan tes swab antigen/antibody ini. "Selain layanan swab, di minilab juga bisa rapid test," kata Iskandar.

Iskandar menerangkan, auditor BPKP yang menjadi ujung tombak akuntabilitas keuangan negara harus turun ke lapangan di tengah pandemi Covid-19. Pengadaan minilab Covid-19 BPKP Bengkulu ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran. (key)

Meski di Era Pandemi Covid, Tetap Kreatif Bekerja

BENGKULU -Keberadaan wabah Covid-19 berdampak pada seluruh sektor termasuk perekonomian. Tidak hanya masyarakat khususnya pelaku usaha dituntut untuk kreatif agar tetap bertahan di era ini, namun pemerintah daerah pun dituntut agar lebih kreatif dalam bekerja. Untuk menuju Bengkulu yang maju.

Dikatakan Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, Bengkulu Kreatif di Era Pandemi Covid merupakan tema yang diangkat pada HUT Provinsi Bengkulu ke-52 tahun ini. Maknanya, memiliki pesan bahwa, komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu yang didukung pemda kabupaten/ kota serta masyarakat untuk tetap semangat bekerja ber-

sama menuju Bengkulu maju dan kreatif.

"Walaupun dalam kondisi menghadapi situasi pandemi Covid seperti dalam pantun berikut, Benteng Marlborough di tepi laut lepas. Bangunan kokoh menjadi ciri khas. Mari berkreasi tanpa batas. Meskipun di masa pandemi Covid -19," papar Dedy.

Dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 ini, sambungnya, bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan butuh peran aktif dari masyarakat. Seperti tetap patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, hendiari kerumunan tanpa protokol kesehatan, juga menjaga kebersi-

han tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun.

"Tugas kita bersama dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Tidak bosan-bosan kita ingatkan jangan kendor menggunakan masker. Covid-19 ini masih ada, untuk itu kita harus waspada dan mengantisipasi-pasinya," imbuh Dedy.

Lebih lanjut disampaikannya, walaupun tantangan dan permasalahan daerah mewarnai perjalanan pembangunan, ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 saat ini, namun Provinsi Bengkulu masih mampu mencatat berbagai keberhasilan dan prestasi. Beberapa prestasi antara lain, presentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 15,

49 persen pada bulan Maret 2019 menjadi 15, 16 persen pada bulan Maret 2020.

Selain itu, lanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari tahun 2018 sebesar 70,64 persen menjadi 71,21 persen di tahun 2019. IPM Provinsi Bengkulu tahun 2019 telah mencapai target RPJMD yang hanya sebesar 71,00 persen. IPM Bengkulu yang meningkat signifikan yaitu indikator kesehatan.

"Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemprov Bengkulu tahun 2019," demikian Dedy. (key)